

SKRIPSI NIA ALVIANI BR GINTING.pdf

by FAI 28

Submission date: 05-Aug-2026 01:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 3008386924

File name: SKRIPSI_NIA_ALVIANI_BR_GINTING.pdf (1.26M)

Word count: 17915

Character count: 118917

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD*
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

89

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral comprehensive
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH :

NIA ALVIANI BR GINTING
NIM. 102221010026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang diuraikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV mengenai pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengaturan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya negara secara adil serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengelola masyarakat sesuai dengan preferensi mereka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan penerapan otonomi daerah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan pemerintah yang lebih akuntabel dan responsif terhadap tuntutan lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 (2004) dan peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menggantikan dan memperbaiki peraturan ini. Akuntabilitas pemerintah di ubah oleh kedua peraturan ini dari vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan rakyat). Hal ini mendorong pembangunan tata kelola yang lebih adaptif dan terbuka. Artinya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya sebagai pengelola pemerintahan.

¹³ Instansi Pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang dipilih berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. ¹³ Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pemanfaatan ¹³ sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan prosedur, bersifat akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik ¹⁵⁷ agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Heluka *et al.*, 2022).

Pengukuran kinerja pemerintah memiliki peranan yang sangat penting karena melalui penilaian kinerja yang jelas dan terukur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut akan mendukung pelaksanaan pembangunan ¹⁸⁵ yang lebih aktif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pencapaian karyawan dalam meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan disebut sebagai kinerja, dan evaluasi objektif atas kinerja tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan guna menghasilkan hasil yang lebih baik. Laporan ³⁰ keuangan dan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) kepada pemerintah daerah, serta penyediaan layanan publik dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah. ³⁰ Pencapaian target kinerja kegiatan dalam suatu program, penentuan dan kesuaian hasil, tingkat

pencapaian program, pengaruh hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, dan perilaku karyawan semuanya merupakan cara tambahan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (Heluka *et al.*, 2022).

Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Parit”³⁵ merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Riau dengan luas wilayah mencapai lebih dari 11.000 km². Wilayah ini memiliki potensi ekonomi besar terutama dari sektor perkebunan kelapa, perikanan, dan perdagangan. Namun di balik potensi tersebut, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan besar dalam memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kinerja birokrasi di seluruh wilayah kecamatan yang tersebar luas dan didominasi oleh perairan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan komitmen untuk memperkuat¹⁵² sistem pengukuran kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan inovasi digital berbasis e-SAKIP *Smart*. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan transparansi pengukuran kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah¹⁹³ (OPD). Melalui kegiatan workshop dan pelatihan,¹⁷⁷ aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhil dibekali kemampuan dalam mengelola, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja secara lebih terukur <https://mediacenter.inhilkab.go.id/>.

Upaya peningkatan sistem kinerja tersebut membawa hasil positif. Pada tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil meraih penghargaan nasional dari¹⁴⁶ Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas “Kinerja Pelayanan dan Investasi Daerah” dengan kategori Sangat Baik¹⁵⁰. Capaian

ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan publik serta komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski demikian, hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Beberapa OPD masih menghadapi kendala dalam efektivitas pelaksanaan program, serapan anggaran, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar kinerja instansi menjadi lebih efektif dan efisien.

Beberapa hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang dapat diakses, target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Pendidikan Tahun 2024. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan indikator kinerja nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil target 65 realisasi 63,45 capaian 97%. Sasaran strategis kedua meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan target 92 realisasi 84,99 capaian 92%. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan yaitu dengan jumlah masyarakat yang terkadang melebihi jumlah kursi yang disiapkan menyebabkan masyarakat harus berdiri dalam menunggu antrian dan petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta

belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi
<https://disdukcapilnhil.com/sakip/>.

¹⁰⁸
Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah sasaran strategis
³⁴ meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis
unggulan daerah, dengan indikator kinerja ³⁴ persentase UMKM dan koperasi yang
naik skala usaha target 63 realisasi 57,9 capaian 91,9%. Sasaran strategis kedua
meningkatkan pertumbuhan usaha koperasi dan UMKM, dengan indikator kinerja
persentase koperasi yang aktif target 70 realisasi 69,2 capaian 98,9% dan indikator
kinerja pertumbuhan usaha kecil menengah baru target 77 realisasi 8,96 capaian
11,6%. Sasaran strategis ketiga meningkatnya akuntabilitas kinerja ³⁴ Dinas
Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil dengan indikator kinerja
nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri
Hilir dengan target 73 realisasi 70,95 capaian 97,1%. ¹⁴⁵ Permasalahan yang dihadapi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah ⁴¹ yaitu masih rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, Masih rendahnya penguasaan dan
penggunaan teknologi pengelola Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dan ⁴¹ Sulitnya
mengubah pola pikir wirausaha pemula dan pengelola koperasi agar lebih
bertanggungjawab terhadap kelangsungan lembaga maupun usahanya tanpa
bantuan dari Pemerintah. <http://diskopumkm.inhilkab.go.id/laporan-kinerja-insta-nsi-pemerintah-lkjip/>.

³⁴
Pada Dinas Pendidikan sasaran strategis meningkatkan akses pendidikan
formal dan non formal yang merata dan berkeadilan dengan indikator kinerja
angka partisipasi sekolah (1-12) target 101.04 realisasi 95,45 capaian 94,47% dan

Angka partisipasi sekolah (13-15) target 92,55 realisasi 75,82 capaian 81,92%
Angka melanjutkan mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan oleh beberapa keluarga mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak ke tingkat lebih tinggi, terutama jika mereka harus membeli seragam, buku, atau biaya transportasi dan di daerah tertentu, anak-anak mungkin terpaksa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan Program bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), mungkin tidak menjangkau seluruh anak yang membutuhkan di daerah <https://disdik.inhilkab.go.id/laporan-kinerja/>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perjanjian kinerja ⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Pendidikan, terdapat beberapa fenomena yang mencerminkan tantangan dalam kinerja instansi pemerintah. Meskipun ada pencapaian yang mencolok, seperti nilai AKIP yang mendekati target, sebagian besar indikator menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi, seperti dalam hal peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perkembangan UMKM, di mana banyak dari mereka gagal mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menggaris bawahi perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi dan implementasi reformasi birokrasi serta kualitas pelayanan, agar dapat memberdayakan masyarakat secara lebih efektif, terutama dalam peningkatan akses pendidikan yang berkeadilan dan merata.

¹⁷⁵ Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan kinerja instansi pemerintah adalah penegendalian internal yang diterapkan dalam ⁷⁸ organisasi. Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang

dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang bertujuan untuk membantu suatu organisasi mencapai suatu tujuan. Sumber daya organisasi dapat dikelola, dilacak dan dievaluasi melalui pengendalian internal. Pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah dan mengidentifikasi situasi kecurangan dan menjaga sumber daya perusahaan, baik materi maupun non-material. Pengendalian internal juga membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi operasi organisasi, menyampaikan laporan keuangan, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengawasan internal menetapkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tata kelola daerah. Pengawasan internal dilakukan sebagai untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat efektifitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Dengan demikian, pengawasan diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan tersebut (Karlina *et al.*, 2023). Dari laporan BPK yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.426 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.573 (29%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.953 (54%)

permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 900 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern pada semester I tahun 2024.

Sedangkan pada semester II tahun 2024 hasil pemeriksaan mengungkapkan 622 (27%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. ⁹ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Maluku Tengah, antara lain yaitu Pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada 5 puskesmas melebihi tarif perda, Identitas nama dan alamat penerima hibah uang/barang belum diperinci dalam Lampiran dan Penjabaran APBD Perubahan, serta terdapat penyaluran hibah uang kepada penerima yang tidak memenuhi persyaratan. Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 343 pemerintah daerah lainnya <https://www.bpk.go.id/ihps>. Dari Permasalahan kelemahan SPI menunjukkan tantangan dalam pengelolaan pemerintah daerah yang perlu diatasi untuk mencapai *good governance*. Pentingnya kolaborasi antar instansi terkait juga tidak bisa diabaikan dalam upaya memperkuat sistem pengendalian internal. Upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Lingkungan Pengendalian adalah komponen pertama dari beberapa komponen yang membentuk Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP). ⁴ Para pemimpin lembaga pemerintah harus membangun dan mempertahankan lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku baik dan memfasilitasi

14
penggunaan SPIP di tempat kerja. Integritas nilai-nilai etika, dedikasi terhadap kompetensi, kebijakan yang menguntungkan, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab yang tepat, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang baik mengenai pelatihan sumber daya manusia, keberhasilan pelepasan peran aparat pengawasan internal pemerintah, dan hubungan kerja yang positif dengan lembaga pemerintah terkait, semuanya diperlukan untuk mencapai aktivitas ini (Karlina *et al.*, 2023).

71
Untuk mencapai tujuan seperti perlindungan aset, pemeliharaan catatan yang lengkap, penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipercaya, pembuatan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, peningkatan efisiensi operasional, jaminan keberadaan kebijakan manajerial yang telah ditentukan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, sistem pengendalian internal pemerintah akan berdampak pada kinerja lembaga pemerintah. Tingkat komitmen akan menentukan apakah kinerja berhasil atau tidak. Membangun komitmen antara karyawan dan perusahaan, serta antara karyawan dan organisasi, sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang profesional. Setiap orang di perusahaan, dari tingkat terendah hingga tertinggi, tunduk pada pengendalian internal (Putra *et al.*, 2022).

Menerapkan tata kelola yang baik dalam sistem pemerintahan adalah salah satu cara untuk mendukung pengembangan layanan publik berkualitas tinggi. Istilah tata kelola yang baik berasal dari bahasa induk Eropa *governance* yang diadopsi oleh bahasa Inggris sebagai *govern* yang berarti mengalahkan (mengendalikan). Diskusi tentang tata kelola pemerintah yang ideal dikenal

sebagai *good governance*. Pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta dan pemerintah dalam menghasilkan layanan publik berkualitas tinggi tidak dapat diabaikan karena hal itu mendorong kreativitas dan pelaksanaan program yang efektif. Gagasan tata kelola yang baik berkembang seiring dengan pergeseran sistem politik menuju demokrasi dan transisi dari ekonomi direktif ke ekonomi pasar. Tata kelola yang baik kini melibatkan masyarakat sipil, khususnya sektor bisnis, yang berperan dalam tata kelola bukan pemerintah (negara). Layanan publik yang efektif, sistem kontrol yang dapat dipercaya, dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat adalah contoh dari tata kelola yang baik (Wulansari, 2024).

Setiap warga negara dalam suatu pemerintah mengharapkan pemerintah tersebut dijalankan dengan baik. Diharapkan bahwa penerapan tata kelola pemerintah yang baik akan meningkatkan standar pemerintah dan menegakkan ketertiban dinegara tersebut. Berbagai komunitas memiliki gagasan yang berbeda tentang tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu tanda bahwa *Good Governance* yang baik digunakan dengan tepat dan berhasil adalah masyarakat yang makmur (Lionandiva & Triandi, 2022).

16 Berdasarkan hal tersebut, draf tata kelola pemerintah yang baik telah disusun. Tata kelola pemerintah yang baik dikenal sebagai pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan organisasi. Dalam situasi ini, mendorong sinergi positif membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Globalisasi dan evolusi zaman merupakan kekuatan pendorong dibalik *good governance*. Akibatnya, pemerintah didesak

untuk beroperasi secara terbuka dan sistematis. Transparansi ini dapat meningkatkan komponen demokrasi dalam administrasi pemerintah dengan meningkatkan pengawasan publik terhadapnya (Aisy & Haryanto, 2024).

²⁶ *Good Governance* secara umum didefinisikan sebagai administrasi pemerintahan yang sehat berdasarkan etika profesional. Menurut ⁹⁵ Bank Dunia *good governance* adalah upaya untuk membangun manajemen pembangunan yang sehat dan akuntabel (Dharu, 2021). Bagi semua sektor, terutama sektor publik *Good Governance* yang berarti pemerintahan yang baik merupakan sebuah tantangan. Kinerja pemerintah yang kurang memuaskan, khususnya inspektorat di pemerintah daerah, adalah salah satu alasan utama mengapa *Good Governance* perlu diterapkan (Hidayat *et al.*, 2021).

³ Upaya pemerintah untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan dan melibatkan publik guna menciptakan transparansi kinerja di sebut sebagai *Good governance* ³ Sementara akuntabilitas lembaga mencakup pengungkapan dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, termasuk aktivitas, laporan keuangan dan pilihan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Transparansi ini menghasilkan indeks penilaian untuk akuntabilitas suatu lembaga. Penerapan prinsip *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Karlina *et al.*, 2023). Dari laporan (BPK) yang telah

diakses pada laporan yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, hasil pemeriksaan mengungkapkan 7.845 (59%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan administrasi sebesar 1.962 (25%) dan 5.883 (75%)⁹ permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dengan angka 4.147 (70%) sebesar Rp 2,45 triliun, potensi kerugian dengan angka 693 (12%) sebesar Rp 405,20 miliar dan kekurangan penerimaan dengan angka 1.043 (18%) sebesar 631,20 miliar. Sehingga jumlah keseluruhannya yaitu dengan angka 5.883 sebesar Rp 3,49 triliun pada semester I tahun 2024. Sedangkan pada semester ke II tahun 2024 terdapat 1.595 (70%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 259 (16%) penyimpangan administrasi dan 1.336 (84%) permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dengan angka 954 (72%) sebesar Rp 463,80 miliar, potensi kerugian dengan angka 178 (13%) sebesar Rp 135,06 miliar dan kekurangan penerimaan dengan angka 204 (15%) sebesar Rp 151,54 miliar. Sehingga jumlah keseluruhannya yaitu dengan angka 1.336 sebesar Rp 750,40 miliar <https://www.bpk.go.id/ihps>.

Salah satu masalah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rekonstruksi Jalan Ruas VI Pulau Kijang-Sanglar. Dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rekonstruksi Jalan Ruas VI Pulau Kijang-Sanglar, Ada dua tersangka yakni E yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Inhil dan EAS selaku Direktur PT Gunung Guntur, berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, akibat dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek tersebut negara mengalami

kerugian sebesar Rp 6.270.011.525,33. Adapun bentuk kealfaan berupa Pelanggaran Spesifikasi dan Kekurangan Volume. Sehingga penyidik bersama tim ahli teknik sipil menemukan adanya kekurangan volume dan mutu beton struktur FC20 Mpa (K-250). Maka dari hasil pengukuran ditemukan selisih yang cukup signifikan. Seperti panjang rencana: 5.294 meter. Realisasi: 1.387 meter. Kekurangan: 3.906 meter. Volume Beton Rencana: 5.294 m³. Realisasi: 907,94 m³. Kekurangan: 4.296 m³. Mutu Beton Rencana: 20 MPa. Realisasi: 17,5 MPa. Kekurangan: 2,5 Mpa <https://pekanbarupos.co>. Masalah dugaan tindak pidana korupsi ini memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Peristiwa tersebut juga menunjukkan pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Selain itu, kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dana publik agar tidak ada lagi penyimpangan serupa di masa mendatang.

¹⁵³ Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh ¹⁶⁷ pengendalian internal dan *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah. (Putra *et al.*, ¹¹⁴ 2022) *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota samarinda* ³ hasil yang di dapatkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

⁵²
Karlina *et al.*, (2023) *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah* hasil yang di ³dapat akuntansi sektor publik dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Sedangkan, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.

⁴
Handayani *et al.*, (2024) *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten OKU* hasil yang di dapat bahwa ¹⁰⁴ada pengaruh yang signifikan penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ada pengaruh yang signifikan ¹⁷pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹
Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai Pengaruh ¹⁰³Pengaruh Pengaruh Pengendalian Internal, Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. ²Penelitian ini merupakan *review* dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian Karlina *et al.*, (2023). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian, variabel penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel penelitian penerapan akuntansi sektor publik, dan pengawasan internal, objek penelitiannya ⁹⁷pada

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten buru Selatan Provinsi Maluku dan penelitiannya dilakukan pada tahun 2023, sedangkan penelitian ini menggunakan Objek Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2026.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Pengendalian Internal dan *Good Governance* berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

24

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Pengendalian Internal

82

Pengendalian internal adalah prosedur yang dipengaruhi oleh tindakan dewan komisaris, manajemen, atau anggota staf lainnya dan dimaksudkan untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan keakuratan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Selain itu, prosedur ini bertindak sebagai pengaman terhadap bahaya yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi (Karlina *et al.*, 2023).

b. *Good Governance*

Good Governance didefinisikan sebagai manajemen yang sehat dalam suatu bisnis berdasarkan etika profesional dalam bisnis dan pekerjaan. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk sektor publik tetapi juga berfungsi sebagai referensi penting bagi perusahaan swasta untuk menjaga integritas dan meningkatkan transparansi. Tata kelola yang baik mewujudkan penerimaan pentingnya

84

seperangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis dan pelayanan publik (Hidayat *et al.*, 2021).

21

c. Kinerja Instansi pemerintah

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran derajat pencapaian atau tujuan instansi pemerintah sebagai gambaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan derajat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis dapat digunakan untuk mengukur efektivitas lembaga pemerintah (Putra *et al.*, 2022).

2

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui lebih tentang Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah.

21

1

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Temuan yang diperoleh juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan karya tulis lanjutan guna meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian di masa mendatang.

56

25

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja instansi pemerintah serta pentingnya Pengendalian Internal dan *Good Governance* dalam pemerintahan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah.

2

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran terutama mengenai Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur

²
pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel
serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran
umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : ² KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang
kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Teoritis

2.1.1. Teori *Stewardship*

Menurut filosofi *stewardship*, para manajer harus memprioritaskan tujuan organisasi atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi mereka. Dalam hal ini, masyarakat adalah pemilik sumber daya, dan *steward* adalah pemerintah yang mengelolanya (Melasari *et al.*, 2022).

Berawal dari aliran pemikiran akuntansi manajemen, teori *stewardship* berkembang bersama akuntansi sebelum menyebar ke domain ilmiah lainnya. Teori *stewardship* dalam akuntansi menjelaskan gagasan ²⁹ gaya kepemimpinan dan interaksi komunikasi antara pemegang saham dan manajemen, atau hubungan antara manajemen tingkat atas dan manajer tingkat bawah dalam organisasi perusahaan. Dalam akuntansi, teori *stewardship* adalah pendekatan psikologis yang menyoroti kewajiban ²⁹ manajer atau agen perusahaan untuk mengelola aset perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik atau prinsipal. Dalam lingkungan bisnis saat ini, semakin penting bagi ²⁹ manajer atau agen perusahaan untuk menangani aset perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik atau prinsipal. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, yang menyoroti pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset perusahaan. Teori ini juga berasumsi bahwa manajer akan bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. ⁸⁹ Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pengelola

dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh pemilik atau masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. (Syahara *et al.*, 2024).

Menurut teori kepemimpinan yang bertanggung jawab (*stewardship theory*), orang-orang, termasuk para direktur, sering kali didorong oleh perasaan ¹keadilan dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Para direktur juga sering memandang diri mereka sebagai pengelola perusahaan yang dapat dipercaya yang memprioritaskan tujuan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka. Teori *stewardship* menekankan bahwa keberhasilan organisasi dapat dicapai ketika para pengelola bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama (Hidayat *et al.*, 2021).

Menurut teori *stewardship*, manajemen didorong terutama oleh pencapaian hasil organisasi daripada oleh tujuan pribadi. Gagasan ini mengasumsikan bahwa keberhasilan dan kepuasan organisasi saling terkait erat. Memaksimalkan kegunaan kelompok manajemen dan pimpinan tercermin dalam keberhasilan organisasi. Pada akhirnya, memaksimalkan utilitas kelompok ini memaksimalkan kepentingan setiap individu di dalam perusahaan. ¹¹⁸Penelitian akuntansi di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, dapat memperoleh manfaat dari penggunaan teori *stewardship*. ¹¹⁸Akuntansi sektor publik selalu dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari hubungan *steward-principal*. Kompleksitas akuntansi sebagai penggerak transaksi telah berkembang seiring dengan perluasan keahlian akuntansi dan pertumbuhan entitas sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, aparatur negara ¹⁹berperan sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik demi

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal yang baik menjadi penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. (Hidayat *et al.*, 2021).

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan, Teori *stewardship* melihat hubungan manajemen dan pemilik sumber daya secara positif. Manajer dianggap lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Perspektif ini cocok diterapkan pada organisasi publik, karena mendorong kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, manajer yang bertindak dengan motivasi keadilan dan kepedulian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang etis berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan kontraktual antara pihak yang mengeluarkan wewenang atau mandat (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang tersebut untuk mengatur organisasi (*agen*) dijelaskan oleh teori keagenan dalam manajemen publik. Hubungan keagenan ini terwujud di tingkat pemerintahan daerah ketika kepala daerah atau badan legislatif bertindak sebagai prinsipal dan memberikan mandat, wewenang anggaran, dan wewenang pelaksanaan program kepada Organisasi Aparat Daerah (OPD), yang bertindak sebagai agen pelaksana. (Rudolf, 2024). Tujuan dari pengalihan wewenang ini adalah untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga yang kompeten dapat berhasil mengawasi pembangunan regional dan

layanan publik. Asimetri informasi, atau situasi di mana aparat lembaga pemerintah memiliki akses ke informasi yang jauh lebih cepat dan lebih rinci mengenai kondisi aktual operasi lapangan dan penyerapan anggaran dibandingkan dengan pihak utama atau masyarakat luas, adalah masalah utama lembaga yang sering terjadi di OPD. Agen dapat terlibat dalam perilaku oportunistik sebagai akibat dari kesenjangan pengetahuan yang besar ini, seperti memanipulasi laporan pencapaian atau mengutamakan kepentingan birokrasi internal di atas pencapaian tujuan pelayanan publik (Putri & Hendaris, 2025).

Dengan menerapkan ⁵⁹ sistem pengendalian internal pemerintah dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka diperlukan mekanisme pengawasan (mekanisme monitoring) yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut dan menyelaraskan tujuan agen dengan visi prinsipal. Setiap tindakan agen dapat dijaga dan dibatasi untuk mencegah penyimpangan melalui pengendalian internal yang disiplin, dan OPD sebagai agen terpaksa memperluas batasan asimetri informasi melalui penerapan ¹⁶¹ tata kelola yang baik yang menekankan pada transparansi (Widya, 2026). Akan ada lebih sedikit ruang bagi pejabat untuk bertindak oportunis ketika sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik dan didukung oleh tata kelola yang transparan, yang akan segera meningkatkan kinerja lembaga pemerintah (Putri & Hendaris, 2025).

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan, Teori keagenan (*agency theory*) dalam manajemen publik menjelaskan hubungan kontraktual di pemerintah daerah antara kepala daerah atau legislatif sebagai prinsipal (pemberi mandat dan anggaran) dengan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) sebagai agen pelaksana. Namun, hubungan ini sering memicu konflik akibat adanya asimetri informasi, di mana OPD memiliki data operasional dan anggaran yang lebih detail sehingga membuka celah bagi perilaku oportunistik, seperti manipulasi laporan atau mengutamakan kepentingan internal birokrasi.

2.1.3. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh organisasi atau lembaga itu sendiri berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan bisnis sehingga beroperasi sesuai dengan aturan, di mana sistem atau aturan yang dibangun tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di luar organisasi atau lembaga sehingga aktivitas berjalan efektif dan efisien. Penerapan pengendalian internal yang konsisten juga membantu mengurangi kemungkinan kesalahan, penyimpangan, dan kemungkinan kecurangan dalam semua aktivitas operasional. Jika semua tingkatan organisasi mengadopsi sistem pengendalian secara bersamaan dan konsisten, sistem tersebut akan dapat berfungsi dan bermanfaat. Implementasi pengendalian internal secara simultan dan berkelanjutan pada akhirnya akan mencapai tujuan sistem, yaitu menghasilkan laporan yang dapat diandalkan, efisien, dan efektif (Irianto *et al.*, 2024).

Menurut INTOSAI, pengendalian internal adalah prosedur penting yang dipengaruhi oleh manajemen personalia dan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan memberikan jaminan yang cukup dalam mencapai misi organisasi dengan mencapai tujuan-tujuan umum berikut (Elkha, 2020) :

1. Terlaksananya kegiatan yang tertib, etis, ekonomis, efisien dan efektif;
2. Terpenuhinya kewajiban akuntabilitas;

80
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan

4. Terlindunginya sumber daya dari kehilangan dan penyalahgunaan.

64
Sistem atau proses pengendalian internal suatu organisasi memastikan bahwa prosedur operasional mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dan prosedur organisasi untuk menjaga aset dan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya termasuk dalam pengendalian internal. Gubernur, bupati atau walikota, dan menteri atau kepala lembaga harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan operasi pemerintah untuk menghasilkan manajemen 160 keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Elkha, 2020).

Untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau entitas terkait pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional, 74 serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pengendalian internal adalah prosedur terencana yang dibuat, dilaksanakan, dan dipelihara oleh 69 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan manajemen lainnya. Manajemen akan dapat mengidentifikasi kemungkinan kecurangan atau insiden jika setiap laporan dibuat dengan benar. Hal ini juga berlaku jika penipuan dilakukan oleh manajemen. Hal ini dimungkinkan karena kecurangan biasanya memanfaatkan kelemahan dalam pengendalian internal dan sistem akuntansi (Adawiyah *et al.*, 2023). Regulator, legislator, dan ilmuwan telah lama tertarik pada pengendalian internal karena dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan pelanggaran yang melanggar hukum. 19 pengendalian internal juga berperan dalam meningkatkan efektivitas operasional serta menjaga keandalan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan

25 organisasi. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efisien dan akuntabel (Sari *et al.*, 2023).

Pentingnya pengendalian internal tidak dapat dilebih-lebihkan. Aset organisasi dapat dijaga dan dilindungi dari kemungkinan kerugian dengan menggunakan 50 sistem pengendalian internal yang kuat. Selain itu, pengendalian internal 31 menjamin keakuratan dan keandalan laporan keuangan akhir, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang bijak dan memenuhi persyaratan pelaporan kepada pihak luar seperti investor dan regulator. Tujuan penting lainnya adalah kepatuhan terhadap peraturan, yang mengurangi risiko hukum dan kemungkinan sanksi atas ketidakpatuhan (Sudarmanto *et al.*, 2024).

180 Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan Kesimpulannya, pengendalian internal adalah sistem untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai aturan agar tujuan tercapai dengan baik. Sistem ini membantu mengurangi risiko dan mencegah kecurangan, serta membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya. Selain itu, pengendalian internal juga menjaga aset organisasi dan mendukung transparansi serta akuntabilitas.

2.1.3.1. Indikator Pengendalian Internal

113 Pengendalian internal adalah prosedur yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari unit bisnis. Tujuannya adalah untuk menjamin 50 bahwa semua operasi organisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan. COSO menyatakan bahwa ada

lima persyaratan untuk pengendalian internal, yaitu (Qhofifah & Rahmawati, 2025) :

1. Lingkungan Pengendalian

Kondisi yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal dikenal sebagai lingkungan pengendalian. Komponen kunci dari implementasi SPIP adalah lingkungan pengendalian, yang meliputi struktur organisasi yang memfasilitasi pengendalian internal, kompetensi karyawan, dan prinsip-prinsip etika (Pratiwi *et al.*, 2025). Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi seluruh sistem pengendalian internal.

2. Informasi dan Komunikasi

Untuk mempermudah pemanfaatannya, komponen informasi dan komunikasi menyoroti pentingnya mengidentifikasi kontrol yang relevan dan informasi terkait serta mengkomunikasikannya secara tepat waktu dan sesuai kepada para pemangku kepentingan yang relevan di dalam bisnis. Selain itu, sangat penting bahwa semua proses organisasi memuat kebijakan dan prosedur resmi yang diberikan kepada setiap karyawan sehingga mereka menyadari tanggung jawab mereka sendiri dan bagaimana hal itu memengaruhi karyawan lain (Sumarna & Novitasari, 2022).

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses di mana suatu bisnis, organisasi, atau lembaga mengevaluasi berbagai jenis bahaya dan risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Proses penilaian risiko meliputi penentuan faktor-faktor yang memengaruhi risiko, pemeriksaan bahaya yang relevan yang dapat menghambat

pencapaian tujuan perusahaan, dan pembuatan rencana untuk mengelola risiko yang dihadapi. Manajemen menggunakan penilaian risiko sebagai dasar untuk memilih prioritas pengendalian dan strategi mitigasi terbaik berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas terjadinya risiko (Ferdianto & Desitama, 2023).

4. Kegiatan Pengendalian

⁴ Kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk menjamin bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani risiko dilakukan dengan benar dapat dianggap sebagai aktivitas pengendalian (Pratiwi *et al.*, 2025). Selain itu, langkah-langkah pengendalian ini membantu menjamin manajemen sumber daya yang efisien, kepatuhan terhadap aturan, dan pengurangan kesalahan atau penyimpangan. Operasi pengendalian harus sesuai, beroperasi secara konsisten sesuai dengan rencana dari waktu ke waktu, efisien, menyeluruh, masuk akal, dan berhubungan langsung dengan tujuan pengendalian agar dianggap efektif. Di setiap tingkatan dan di setiap fungsi organisasi, aktivitas pengendalian terjadi. Untuk menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko, para pemimpin organisasi menciptakan aktivitas pengendalian yang dijelaskan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan prosedur.

5. Pemantauan

Tujuan pemantauan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa pengendalian diterapkan sesuai dengan tujuan dan disesuaikan dengan tepat untuk memperhitungkan perubahan. Efisiensi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) ditentukan oleh pemantauan, yang merupakan prosedur evaluasi berkala (Pratiwi *et al.*, 2025). Pemantauan juga harus menentukan apakah misi entitas dijalankan

sambil memenuhi tujuan umum yang diuraikan dalam definisi pengendalian internal. Pemantauan pengendalian internal dilakukan melalui tinjauan, penilaian independen, dan tindak lanjut atas rekomendasi audit. Tugas rutin, pengawasan, *benchmarking*, rekonsiliasi, dan tindakan terkait tugas lainnya digunakan untuk melakukan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan Indikator pengendalian internal adalah alat untuk ⁶⁷ menilai apakah sistem pengendalian dalam organisasi sudah berjalan dengan efektif. Indikator ini melihat kepatuhan pada aturan, efektivitas pengawasan, serta kemampuan organisasi mengelola risiko. Dengan indikator yang tepat, manajemen bisa memastikan operasional berjalan baik, mengurangi kesalahan atau penipuan, dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Dalam audit internal, indikator ini juga penting untuk memberi jaminan bahwa kegiatan organisasi sesuai standar.

2.1.3.2. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Irianto *et al.*, (2024), Memastikan bahwa risiko yang terkait dengan operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dikendalikan dengan tepat adalah ⁵⁰ tujuan pengendalian internal. Secara umum, pengendalian internal berfungsi ¹⁰⁶ untuk melindungi aset bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta menjamin ketepatan waktu dan keakuratan ⁶⁷ pelaporan keuangan. Pengendalian internal berfungsi untuk melindungi aset bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, dan menjamin pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Akibatnya, keberlangsungan perusahaan bergantung pada penerapan ⁵⁰ pengendalian internal

yang efisien. Selain itu, kerangka pengendalian internal yang kuat membantu menumbuhkan budaya kerja yang baik dan meningkatkan motivasi karyawan. Akibatnya, tempat kerja menjadi lebih akuntabel dan terbuka. Selain itu, tujuan ini menjamin bahwa bisnis mematuhi semua hukum dan kebijakan yang relevan dan mencakup persyaratan minimum yang mungkin. Tidak diragukan lagi ada tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan suatu aturan atau sistem, serta tujuan yang harus dicapai oleh orang yang menciptakannya. Berikut adalah tujuan pengendalian internal:

a. Menjaga Kekayaan Organisasi.

Dokumen penting, surat berharga, dan data keuangan adalah contoh aset tak berwujud yang dapat dicuri, disalahgunakan, atau dihancurkan tanpa disengaja. Langkah-langkah pengendalian internal diterapkan untuk menghentikan atau dengan cepat mengidentifikasi catatan dan aktivitas akuntansi yang hilang. Kekhawatiran utama lainnya adalah keamanan informasi, yang memerlukan enkripsi dan pengamanan informasi pribadi untuk mencegah kebocoran.

32

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Untuk menjalankan operasional, manajemen membutuhkan data akuntansi yang dapat diverifikasi keakuratannya. Kesalahan dapat dicegah dan dideteksi pada saat yang tepat melalui sistem pengendalian internal.

c. Mendorong efisiensi

Tujuan pengendalian dalam suatu organisasi adalah untuk menghilangkan pemborosan di semua aspek bisnis, termasuk penggunaan sumber daya keuangan yang tidak efisien, dan untuk menghindari duplikasi pekerjaan yang tidak perlu.

36

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen membuat kebijakan dan pedoman. Proses-proses ini dijalankan sesuai rencana berkat mekanisme pengendalian internal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali potensi masalah dan mengambil tindakan sebelum masalah tersebut menjadi hambatan yang signifikan.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan pengendalian internal sangat penting untuk melindungi aset organisasi. Sistem ini membantu mencegah pencurian, penyalahgunaan, atau kerusakan aset, termasuk dokumen dan catatan keuangan. Selain itu, pengendalian internal membuat data akuntansi lebih akurat, sehingga keputusan manajemen lebih tepat. Sistem ini juga membantu organisasi bekerja lebih efisien dengan mengurangi kesalahan, duplikasi pekerjaan, dan pemborosan. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar pengendalian tetap efektif. Pengendalian internal memastikan kebijakan dan prosedur manajemen dijalankan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai lebih optimal.

2.1.4. Pengertian *Good Governance*

Para praktisi di organisasi pembangunan internasional adalah yang pertama kali merangkul gagasan *Good Governance*. Kinerja yang efektif terkait dengan administrasi publik dan korupsi merupakan prasyarat untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, menerapkan gagasan *Good Governance* membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi. Institut Bank Dunia mendefinisikan *Good Governance* sebagai "Kekuasaan negara digunakan

untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat." ¹¹ Sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat dikelola oleh negara. Oleh karena itu, *Good Governance* dapat dilihat sebagai sebuah tradisi. Dalam konteks yang sama, Bank Dunia menulis dalam sebuah laporan tahun 2000 bahwa "tata kelola pemerintahan yang buruk dan lembaga sektor publik yang disfungsi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pembangunan yang adil di banyak negara berkembang." Menurut Bank Dunia, pemerintahan yang lemah dan lembaga sektor publik yang disfungsi adalah akar penyebab kemiskinan dan kegagalan ekonomi di negara-negara berkembang (Karso, 2022).

Secara umum, *Good Governance* didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan penerapan konsep-konsep fundamental, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Menurut Bank Dunia, ²⁶ *Good Governance* adalah pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab yang berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan pasar yang efisien, sebagaimana dinyatakan dalam buku Akuntansi Sektor Publiknya. Mencegah korupsi, menjaga pengendalian anggaran, menghindari kesalahan investasi, dan membangun lingkungan politik dan hukum yang mendorong ekspansi perusahaan adalah tujuan utama dari gagasan *Good Governance* ini (Rahman *et al.*, 2025). Bank Dunia pertama kali menggunakan istilah *Good Governance* dengan maksud untuk membangun tata kelola yang sehat dan baik guna memenuhi tuntutan organisasi donor asing untuk administrasi pemerintahan menggunakan pendanaan pinjaman dari organisasi-organisasi tersebut (Simamora,

2023). *Good Governance* adalah penerapan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab yang konsisten dengan prinsip-prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi politik dan administratif, menetapkan disiplin anggaran, dan menetapkan kerangka kerja politik dan hukum untuk perluasan kegiatan bisnis (Edowai *et al.*, 2021).

Pada intinya, *Good Governance* adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dengan cara yang memungkinkan akuntabilitas kolektif. Untuk mengelola suatu negara, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus memenuhi persyaratan ini (Jatmiko, 2020). Konsep ini pertama kali dijelaskan sebagai penggunaan kekuasaan politik untuk menyelesaikan masalah suatu negara dalam laporan *governance* Bank Dunia. Istilah *governance* pertama kali digunakan dalam publikasi Bank Dunia dan kemudian didefinisikan sebagai penggunaan otoritas pemerintah untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi suatu negara untuk pembangunan. Konsep *governance* telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mencakup unsur-unsur keterlibatan publik dan akuntabilitas pemerintah yang lebih terbuka. Selain sebagai masalah *governance* yang baik, *governance* terkait erat dengan keberhasilan kebijakan pembangunan nasional dan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kesejahteraan publik dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kualitas *governance*. Selain itu, *governance* dianggap penting untuk mendorong stabilitas politik dan menarik investasi internasional. Oleh karena itu, bagi banyak negara yang menghadapi masalah pembangunan yang sulit, berkonsentrasi pada peningkatan

⁸ *governance* sangatlah penting. Dua tahun kemudian, *World Bank* kembali mempertajam pengertian *governance* tersebut dengan menyatakan bahwa *governance* dikarakteristikan oleh (Edowai *et al.*, 2021):

- ⁸ 1. Pembuatan kebijakan yang terbuka dan dapat diprediksi (yaitu, dengan proses yang transparan);
2. Birokrasi yang dijiwai oleh etos kerja yang profesional
3. Pemerintah eksekutif yang akuntabel atas tindakannya
4. Partisipasi masyarakat sipil yang besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Semua pihak bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

¹⁴⁸ Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan *Good governance* adalah konsep yang mula-mula diadopsi oleh praktisi lembaga pembangunan internasional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Konsep ini mendorong manajemen publik yang solid agar pengelolaan ¹¹ sumber daya ekonomi dan sosial berjalan demi pembangunan masyarakat. *World Bank* menekankan bahwa lembaga sektor publik yang buruk dan pemerintahan yang lemah menjadi hambatan ¹⁴⁴ utama bagi pertumbuhan dan pembangunan di banyak negara berkembang. Dengan kerangka hukum dan politik untuk mencegah korupsi serta menjaga disiplin anggaran, *good governance* juga berupaya menciptakan keputusan yang akuntabel dan relevan melalui kerja sama antara pemerintah, warga, dan sektor swasta, sehingga menghasilkan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan publik.

2.1.4.1. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Istilah *prinsip Good Governance* merujuk pada kumpulan standar dan prosedur yang mendorong akuntabilitas, keterbukaan, keterlibatan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan atau organisasi. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur pengambilan keputusan dilakukan secara adil, efektif, dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Akuntabilitas menjamin bahwa para pemangku kepentingan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sementara transparansi memungkinkan informasi yang relevan dikomunikasikan dengan benar. Akuntabilitas menyoroti pentingnya kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sedangkan partisipasi mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Pencapaian tujuan pembangunan membutuhkan pengintegrasian konsep *Good Governance* ke dalam semua aspek kebijakan dan prosedurnya. Organisasi dan pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang lebih baik dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam praktik.

8

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian *good governance*, dapat disimpulkan bahwa kunci dalam pemahaman mengenai konsep tersebut terletak pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *good governance* itu sendiri.

8

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* dari UNDP, LAN menyebutkan terdapat 9 prinsip-prinsip *good governance*, yaitu (Nurhidayat, 2023):

1. *Participation* : Berdasarkan prinsip kebebasan berserikat, berbicara, dan keterlibatan konstruktif, setiap orang memiliki suara dalam pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui perantara organisasi hukum yang melayani kepentingan mereka;

2. *Rule of law* : Semua hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, harus tidak memihak dan adil. Untuk menjamin bahwa setiap kebijakan bertanggung jawab, penegakan hukum harus pasti.

3. *Transparency* : Pertukaran informasi yang terbuka adalah dasar transparansi. Informasi, lembaga, dan prosedur segera tersedia bagi individu yang membutuhkannya. Informasi perlu dipantau dan mudah dipahami.

4. *Responsiveness* : Semua pemangku kepentingan harus dilayani oleh lembaga dan prosedur kelembagaan;

5. *Consensus Orientation* : Dalam hal aturan dan prosedur, tata kelola yang sukses menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan untuk menghasilkan pilihan terbaik demi manfaat yang lebih besar;

6. *Equity* : Setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;

7. *Effectiveness and Efficiency*: Organisasi dan prosedur menghasilkan hasil dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;

8. *Accountability* : Publik dan organisasi terkait (pemangku kepentingan) meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan di sektor publik, korporasi, dan masyarakat sipil. Organisasi dan jenis keputusan yang diambil, apakah keputusan tersebut melayani kepentingan internal atau eksternal organisasi, menentukan akuntabilitas ini;

9. *Strategic Vision* : Publik dan para pemimpin perlu memiliki pandangan yang luas dan komprehensif tentang pembangunan manusia dan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan Prinsip-prinsip *good governance* saling berkaitan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan inklusif. Partisipasi membuat warga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, *rule of law* memastikan hukum berlaku adil bagi semua. Transparansi membuka akses informasi agar publik bisa mengawasi, sementara *responsiveness* menegaskan lembaga harus mampu melayani kebutuhan masyarakat. Konsensus membantu mengambil keputusan yang dapat diterima banyak pihak, dan *equity* menjamin semua orang mendapat hak serta kesempatan yang sama. Efektivitas dan efisiensi memastikan sumber daya digunakan sebaik mungkin, sedangkan akuntabilitas menuntut pejabat bertanggung jawab kepada publik. Terakhir, *strategic vision* mendorong pemimpin berpikir jangka panjang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jika semua prinsip ini diterapkan bersama, pemerintahan menjadi lebih transparan, responsif, adil, dan berkesinambungan.

2.1.5. Pengertian kinerja instansi pemerintah

Pencapaian tujuan atau sasaran suatu lembaga pemerintah sebagai perwujudan dari visi, tujuan, dan strateginya disebut sebagai kinerja lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan operasi sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Noch *et al.*, 2021). Selain penting untuk menjaga akuntabilitas publik, evaluasi kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Pengambilan keputusan dan keberlanjutan dapat ditingkatkan melalui penilaian kinerja lembaga secara metodis.

¹⁹¹ Keberhasilan suatu organisasi dan hasil yang dicapai melalui tindakan para anggotanya tercermin dalam kinerja pemerintah atau organisasi, yang merupakan ukuran tingkat pencapaian yang dapat diraih. Cara lain untuk mendefinisikan kinerja adalah ²⁶ sebagai hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh semua komponen organisasi menggunakan sumber daya tertentu (input). Selain itu, kinerja adalah hasil dari sejumlah tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan organisasi tertentu. Kinerja suatu organisasi adalah hasil dari orang-orang atau komponen ¹⁷⁹ organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi (Elkha, 2020).

¹⁷⁴ Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk memenuhi visi dan misi ²⁴ instansi pemerintah, pengukuran kinerja berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan (Edowai *et al.*, 2021). Salah satu aspek terpenting dari tata kelola daerah adalah interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, interaksi ini berfungsi sebagai ukuran efektivitas tata kelola yang baik selain mencerminkan penerapan cita-cita demokrasi dan desentralisasi. Melalui berbagai inisiatif, peraturan, dan layanan publik, ⁸³ pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendengarkan tujuan, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya keterlibatan masyarakat,

kurangnya akuntabilitas dan transparansi, serta konflik kepentingan yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan ekonomi daerah hanyalah beberapa kesulitan yang sering dihadapi dalam hubungan ini. Untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan hubungan dengan masyarakat (Suryawati *et al.*, 2025).

Tingkat efektivitas suatu lembaga pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut sebagai kinerja lembaga pemerintah. Ini mencakup efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan program, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat umum. Indikator seperti kepuasan publik, keterbukaan manajemen anggaran, dan akuntabilitas pengambilan keputusan juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas lembaga pemerintah. Perubahan paradigma tata kelola menandakan perubahan signifikan dalam metodologi dan ideologi yang mendasari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pada periode kontemporer, paradigma tata kelola telah mengalami transformasi yang cukup besar dari model yang lebih tradisional menjadi model yang lebih inklusif, responsif, dan terbuka. Paradigma baru ini sangat menekankan pencapaian hasil yang terukur, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan adalah salah satu prinsip utama perubahan paradigma dalam pemerintahan ini. Pemerintah sekarang dipandang sebagai mitra yang bekerja sama dengan warganya, bukan sebagai organisasi yang mementingkan diri sendiri. Keterlibatan

publik dalam penyusunan anggaran, perumusan kebijakan, dan bahkan integrasi kinerja pemerintah adalah contoh dari partisipasi ini. Akibatnya, masyarakat menjadi objek sekaligus subjek yang secara aktif memengaruhi jalannya dan kebijakan pemerintah (Judijanto & Afandy, 2024).

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan Kinerja instansi pemerintah menunjukkan seberapa baik lembaga mencapai tujuan melalui pelayanan publik yang baik, penggunaan sumber daya secara efisien, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah perlu dekat dengan masyarakat agar prinsip *good governance* benar-benar terlaksana. Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya partisipasi warga, minimnya transparansi, dan potensi konflik kepentingan yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Karena itu, pemerintahan perlu beralih ke paradigma yang lebih terbuka, responsif, dan inklusif. Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai objek kebijakan. Keterlibatan warga dalam menyusun kebijakan dan mengawasi kinerja pemerintah akan membuat tata kelola lebih baik dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

2.1.5.1. Pendekatan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Tuntutan publik akan akuntabilitas dan transparansi di lembaga pemerintah telah meningkat sejak era reformasi dimulai pada tahun 1999. Selain itu, karena krisis yang multifaset, negara-negara donor memiliki harapan serupa terhadap program pemulihan ekonomi Indonesia. Kini, partisipasi publik dalam evaluasi kinerja menjadi sangat penting. Hal ini mendorong pemerintah untuk berupaya

meningkatkan kinerjanya. Pemerintah harus menerapkan sistem pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerjanya (Sapulette, 2023). Pendekatan ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, selain membantu dalam demonstrasi efektivitas program. Pemerintah dapat memastikan bahwa metrik kinerja secara akurat mewakili situasi di lapangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses ini.

24

Menurut Mahsun terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang dapat diuraikan sebagai berikut (Edowai *et al.*, 2021):

24

1. Analisis Anggaran Adalah mengukur kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran. Hasilnya berupa varians positif atau negatif. Kinerja input keuangan merupakan penekanan utama dari metode ini. Anggaran dan laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang digunakan dalam analisis fundamental. Selain itu, studi ini dapat menyoroti area untuk pengembangan dan menjelaskan seberapa efektif sumber daya digunakan. Melalui analisis anggaran, organisasi dapat mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hasil analisis tersebut juga dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan serta menyusun perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

36

2. Analisis Rasio Laporan Keuangan merupakan salah satu metode untuk memahami masalah dan kemungkinan yang ditemukan dalam laporan keuangan adalah analisis rasio laporan keuangan. Perhitungan ukuran keuangan, termasuk likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan rasio pasar, merupakan dasar untuk evaluasi kinerja. Gambaran yang lebih terfokus tentang

keadaan dan kesehatan kinerja lembaga pemerintah dapat diperoleh dengan mengevaluasi berbagai metrik keuangan.

98
3. *Balanced Scorecard Method* Kinerja dievaluasi menggunakan faktor keuangan dan non-keuangan dengan menggunakan teknik Balanced Scorecard. Empat perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi pembelajaran termasuk dalam dimensi pengukuran. Pendekatan ini mengidentifikasi elemen non-keuangan yang memengaruhi dan meningkatkan kinerja organisasi di masa depan, selain mengevaluasi pencapaian kinerja organisasi dari sudut pandang keuangan.

24
4. *Performance Audit (Pengukuran Value for Money)* Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah dasar dari evaluasi kinerja dan audit. Dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran, ekonomi mengukur efektivitas pengeluaran. Efisiensi berkaitan dengan mengevaluasi kebenaran metode, yaitu dengan membandingkan input dan output. Sementara itu, efektivitas mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan value for money, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan Pengukuran kinerja instansi pemerintah perlu menggunakan berbagai metode agar bisa menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik. Analisis anggaran membantu melihat perbedaan antara rencana dan realisasi keuangan. Analisis

rasio laporan keuangan menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja operasional. *Balanced scorecard* menggabungkan aspek finansial dan nonfinansial sehingga penilaiannya lebih menyeluruh. *Performance* audit menilai apakah belanja sudah ekonomis, efisien, dan efektif.

³⁴ 2.1.5.2. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Instansi Pemerintah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program serta kebijakan yang diimplementasikan oleh instansi pemerintah. Indikator ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti *output* (hasil langsung dari kegiatan), *outcome* (hasil yang lebih luas dan berkelanjutan), serta kinerja keuangan dan non-keuangan. Penggunaan indikator kinerja yang tepat membantu instansi pemerintah dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan¹⁸⁸. Selain itu, indikator kinerja juga menjadi dasar dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Menurut Edowai *et al.*, (2021) ada beberapa komponen dalam pengukuran kinerja¹¹ yaitu:

1. Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, untuk menggunakan anggaran secara hemat¹⁷³ tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi penerapan prinsip ekonomi akan membantu instansi dalam mengalokasikan anggaran secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021).

2. Efisiensi

Menurut Edowai *et al.*, (2021) efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasa *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Ukuran efisiensi mengukur biaya atau output (*cost of output*). Prinsip efisiensi menunjukkan perbandingan antara output yang dikeluarkan dengan input yang digunakan, sesuai dengan target atau standar lonerja yang sudah ditetapkan (Rahman *et al.*, 2025).

3. Efektivitas

Menurut Edowai *et al.*, (2021) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencaoi tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan sangat bergantung pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari satu pelayanan dikaitkan dengan outputnya.

Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai,

mengidentifikasi yang memerlukan perbaikan. ¹⁵⁹ Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data, sehingga instansi dapat merespons perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif, berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan. Selain itu, indikator kinerja juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat menilai tingkat keberhasilan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

²² 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti juga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

² Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
⁴⁶ 1	⁴⁶ Rosen Heluka, Victor Pattiasina, Entar Sutisman, Melyanus Bonsapia, Andarias Patiran	Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah <i>Journal of Business</i>	⁴⁶ Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Instansi	¹³ Good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi

2 No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
	2022	<i>Application</i> Volume 1 Nomor 1 Hal. 40 – 53	Pemerintah	13 Pemerintah Kabupaten Yahokimo, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo
2	3 Neneng Karlina, Trisna Sary Lewaru, Dwi Kriswantini 2022	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Rimba Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi Volume 1, No. 3 Agustus 2023 e-ISSN: 2988-6880, Hal 300-306	4 Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah	6 akuntansi sektor publik dan good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
3	1 tanti Melasari, Rosliana, Peni Silvionita 2022	Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 11, No. 2, E-ISSN : 2598-737	Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah	1 pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

² No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Dhana Driyantama, Putra Cornelius Rantelangi, Ferry Diyanti 2022	¹ Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), Vol. 7 (1) ISSN : 2715-3800	²¹ Data transparansi, akuntabilitas, pengendalian intern, kinerja instansi pemerintah	²¹ transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda, akuntabilitas dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota
5	¹⁷ Risky Handayani, Yulitiawati, Eka Meiliya Dona, Hasidul Aini 2024	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerahkabupaten Oku. Jurnal ¹⁷ isnis Darmajaya, Vol 10. No. 1,	Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Internal, Kinerja Instansi Pemerintah	¹⁷ Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu, pengendalian internal berpengaruh ¹⁷ signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Sumber : Data olahan, 2026

2.3. Kerangka Pemikiran

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak potensi, tetapi keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kinerja instansi pemerintah (OPD).

132

Kinerja ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengendalian internal dan *good governance*. Pengendalian internal dan *good governance* merupakan dua aspek krusial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Keduanya saling mendukung, pengendalian internal yang efektif memperkuat pelaksanaan *good governance*, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Penilaian terhadap kinerja instansi dapat dilihat dari efisiensi dan efektivitas layanan, penggunaan anggaran, serta kepuasan masyarakat.

25

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di dalam instansi sangat diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, instansi pemerintah dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya mengoptimalkan kepercayaan publik. Upaya ini bukan hanya meningkatkan kinerja instansi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Indragiri Hilir.

99

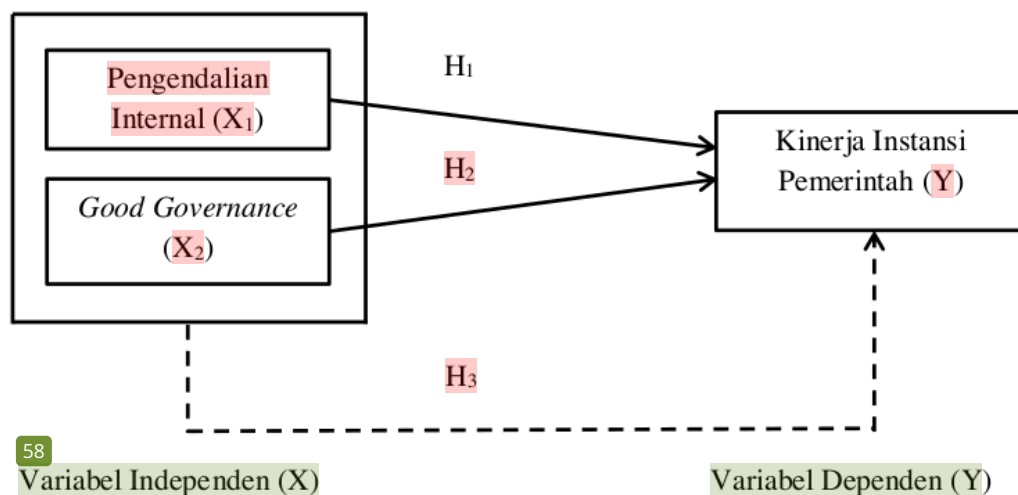
Pengendalian internal merupakan mekanisme yang diterapkan untuk memastikan setiap kegiatan OPD berjalan sesuai rencana, efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur, pengawasan internal, manajemen risiko, serta deteksi dan pencegahan penyimpangan. Dalam praktiknya, jika pengendalian internal dijalankan dengan baik, maka setiap program dan penggunaan anggaran dapat lebih terkontrol, sehingga kinerja instansi dapat meningkat.

Melaksanakan pengendalian internal diharapkan mampu mencegah korupsi dan penyelewengan dalam instansi pemerintah. Dalam Pemerintahan merupakan faktor pemicu yang cukup besar seseorang melakukan korupsi dan penyelewengan dan keserakahan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan sistem pengendalian yang tidak efektif. ¹¹² Penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian internal sangat penting untuk menjaga integritas lembaga. Tidak hanya pengendalian internal yang harus efektif untuk mencegah hal tersebut, *good governance* juga dibutuhkan dalam mencegah hal tersebut. Kombinasi antara kedua elemen ini akan menciptakan sebuah sistem yang menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

¹²⁹ *Good governance* menekankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pejabat, dan kepatuhan terhadap peraturan. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan nilai dan etika dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kurangnya *good governance* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ⁷⁵ Sistem pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, instansi pemerintah tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat, memastikan bahwa ¹⁶⁹ pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Upaya berkelanjutan untuk memperkuat

111 pengendalian internal dan *good governance* akan menjadi fondasi yang solid bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa depan. Pembahasan dalam 14 penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan 26 dapat memberikan kontribusi bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitasnya.

1 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- > Parsial
- - - - -> Simultan

70 2.4. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan telaah teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesa berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

H₁ : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

- H₂ : *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir
- H₃ : Pengendalian Internal dan *Good Governance* berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

BAB 11

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis. Untuk mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan, metode kuantitatif dapat dipahami sebagai teknik penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data kuantitatif dan statistik (Sugiyono, 2022). Pendekatan kuesioner digunakan dalam desain penelitian ini. Kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana peserta diberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk diisi (Sugiyono, 2022). Metode ini dipilih karena mampu memperoleh data secara efisien dari sejumlah responden dalam waktu yang relatif singkat. Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen yakni pengendalian internal dan *good governance*. Sedangkan variabel devenden nya yaitu kinerja instansi pemerintah.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dilihat dari waktu penelitian data penelitian ini berupa *cross section data* yaitu data yang diambil dalam kurun waktu tertentu yaitu selama kurang lebih 3 bulan. Waktu tersebut dihitung dari Januari sampai Maret tahun 2026 yang dimulai dari tahap *survey* tempat penelitian, proses perizinan dan pengolahan data.

3.3. Populasi dan Sampel

Semua komponen yang akan digunakan sebagai wilayah generalisasi membentuk suatu populasi. Keseluruhan orang yang akan diukur atau unit yang akan diselidiki adalah elemen populasi. Dalam hal ini, populasi adalah domain generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan jumlah dan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan jumlah 26 OPD.

Tabel 3.1 Daftar Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

No	KATEGORI	DINAS/INSTANSI PEMERINTAH
1	Dinas	Dinas Pendidikan
2		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4		Satuan Polisi Pamong Praja
5		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
9		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
12		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
14		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan
15		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16		Dinas Perikanan
17		Dinas Pertanian
18	Badan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
19		Badan Keuangan dan Aset Daerah
20		Badan Pendapatan Daerah

21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24		Sekretariat Daerah
25		Sekretariat DPRD
26		Inspektorat Daerah

Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/325876/perda-kab-indragiri-hilir-no-1tahun-2025>

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Purposive Sampling dengan pertimbangan tertentu tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas,
2. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan sebagai Kasubag
3. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan sebagai Bendahara
4. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan sebagai Staf/Pegawai
5. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun di masing-masing OPD.
6. Pegawai yang turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran dan yang terlibat dalam pelaporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.4. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Data penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden yaitu OPD Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan dalam penelitian Melasari *et al* (2022), Heluka *et al* (2022) dan Handayani *et al* (2024). Kuesioner dibagikan sendiri oleh peneliti secara langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembalian (*response rate*) kuesioner bisa lebih tinggi. Sebelum menyebarkan kuesioner peneliti terlebih dahulu terjun ke tempat objek penelitian untuk mendapatkan izin penelitian.

3.5. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel independen 1 (Pengendalian Internal), variabel independen 2 (*Good Gvernance*) dan variabel dependen (Kinerja Instansi Pemerintah).

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

3.5.1.1. Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Istilah kinerja lembaga pemerintah merujuk pada pencapaian tujuan atau sasaran lembaga pemerintah sebagai deskripsi visi, misi, dan strategi lembaga

yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan operasi sesuai dengan program dan peraturan yang telah ditetapkan. Variabel kinerja instansi pemerintah menggunakan 10 item pertanyaan yang dikembangkan dari Melasari *et al* (2022). Terdapat 3 indikator pada variabel kinerja instansi pemerintah yaitu:

1. Kinerja pegawai
2. Kinerja manajemen
3. Kinerja instansi

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Dimana dalam pengukurannya terdiri dari 5 skala yaitu, 1. Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS), 3. Netral (N), 4. Setuju (S), dan 5. Sangat Setuju (SS). Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

3.5.2. Variabel Independen (X)

3.5.2.1. Pengendalian Internal (X₁)

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijelaskan dalam kebijakan atau prosedur yang berfungsi sebagai alat untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas operasional yang efisien dan sukses, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan akuntabel, kepatuhan terhadap persyaratan hukum, dan keamanan aset. Pengendalian internal mengurangi kemungkinan kesalahan dan kecurangan sekaligus menjamin bahwa semua operasi organisasi mematuhi standar yang ditetapkan. Diharapkan bahwa pengendalian internal akan menghentikan perilaku tidak jujur yang dapat

merugikan suatu organisasi (Welly, 2021). Variabel pengendalian internal menggunakan 10 item pertanyaan yang dikembangkan dari (Handayani *et al.*, 2024). Terdapat 5 indikator pada variabel pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Komponen penting dari implementasi SPIP adalah lingkungan pengendalian, yang terdiri dari struktur organisasi yang memfasilitasi pengendalian internal, kompetensi staf, dan prinsip-prinsip etika (Pratiwi *et al.*, 2025).

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah proses yang dilakukan oleh suatu bisnis, lembaga, atau organisasi untuk mengevaluasi berbagai jenis bahaya dan ketidakpastian dalam mencapai tujuan (Ferdianto & Desitama, 2023).

3. Aktivitas pengendalian

Suatu strategi atau metode yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk menjamin bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani risiko dilakukan dengan benar dapat dianggap sebagai aktivitas pengendalian (Pratiwi *et al.*, 2025). Menerapkan langkah-langkah manajemen ini secara konsisten sangat penting untuk menciptakan tempat kerja yang produktif dan aman serta berhasil mencapai tujuan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi

Untuk mempermudah penggunaan komponen informasi dan komunikasi menekankan perlunya mengidentifikasi kontrol yang relevan dan informasi terkait serta mengkomunikasikannya secara tepat waktu dan sesuai kepada pihak-pihak yang berwenang di dalam perusahaan (Sumarna & Novitasari, 2022).

5. Pemantauan

Tujuan pemantauan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa pengendalian diterapkan sesuai rencana dan disesuaikan dengan tepat untuk memperhitungkan perubahan. Pemantauan merupakan prosedur penilaian berkala yang sangat penting untuk mengetahui seberapa sukses Sistem Pengendalian Internal (SPIP) tersebut (Pratiwi *et al.*, 2025).

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Dimana dalam pengukurannya terdiri dari 5 skala yaitu, 1. Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS), 3. Netral (N), 4. Setuju (S), dan 5. Sangat Setuju (SS). Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

3.5.2.2. *Good Governance* (X₂)

Sistem yang mengarahkan dan mengelola hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait hak dan kewajiban mereka dikenal sebagai tata kelola yang baik. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab atas kepentingan organisasi adalah tujuan dari penerapan *Good governance*. Variabel *good governance* menggunakan 10 item pertanyaan yang dikembangkan dari (Heluka *et al.*, 2022). Terdapat 3 indikator pada variabel *good governance* yaitu:

1. Kemampuan
2. Akuntabilitas
3. Transparansi

¹ Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Dimana dalam pengukurannya terdiri dari 5 skala yaitu, ⁵ 1. Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS), 3. Netral (N), 4. Setuju (S), dan 5. Sangat Setuju (SS). Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

² 3.6. Analisa Data

Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Dalam tahap-tahap analisa data yang digunakan untuk mengukur kebenaran dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, distribusi jawaban responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27 (Sugiyono, 2022). Metodologi analitis yang sistematis ini berperan penting dalam memastikan hasil penelitian.

²⁶ 3.6.1. Statistik Deskriptif

Salah satu jenis analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi data adalah statistik deskriptif. Teknik untuk mengkarakterisasi ¹³⁴ semua variabel yang dipilih dengan menghitung data sesuai dengan kebutuhan peneliti dikenal sebagai statistik deskriptif. Ringkasan ¹³⁹ empiris atau deskripsi data yang dikumpulkan untuk penelitian diberikan oleh analisis ini. Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat mengetahui gambaran umum karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. ⁴ Analisis deskriptif yang dihasilkan oleh pengolahan data statistik dengan perangkat lunak SPSS adalah statistik deskriptif yang dijelaskan dalam bab ini (Paramita, 2021).

1

3.6.2. Uji Kualitas Data

3.6.2.1. Uji Validitas

56

Data penelitian yang diperoleh dari data primer atau kuesioner yang diberikan kepada responden diuji validitasnya. Skor diberikan pada hasilnya. Hasil dari skor-skor ini kemudian diuji validitasnya. Agar butir-butir kuesioner secara akurat mencerminkan indikator yang diteliti, pengujian validitas berupaya menilai validitas dan konsistensi butir-butir tersebut. Dengan demikian, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang hendak diteliti (Purba *et al.*, 2021).

Korelasi bivariat, atau hubungan antara skor setiap butir pertanyaan dan skor keseluruhan, digunakan untuk memeriksa validitas. Setiap pertanyaan akan memiliki nilai korelasi yang tinggi jika merupakan indikator suatu variabel. Setiap butir pertanyaan dianggap dapat diterima jika nilai korelasi butir-total yang telah dikoreksi lebih tinggi dari 0,3 (Purba *et al.*, 2021).

133

3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk memastikan tingkat kepercayaan suatu alat ukur. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penilaian reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan keandalan data. Estimasi konsistensi alat ukur ketika pengukuran diulang pada berbagai sampel berkaitan dengan reliabilitas. Alat ukur dianggap dapat dipercaya jika hasilnya cukup konstan. Di sisi lain, alat ukur dianggap tidak dapat diandalkan jika sering digunakan dan hasil pengukurannya tidak konsisten dengan temuan sebelumnya. Semakin tinggi nilai koefisien reliabilitas, semakin tinggi pula tingkat konsistensi

66

instrumen dalam mengukur suatu variabel penelitian. Kuesioner dianggap dapat diandalkan jika koefisien alfa (alfa Cronbach) lebih besar dari 0,60 (Purba *et al.*, 2021).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik¹¹⁹

Untuk memastikan persamaan dalam model regresi dapat diterima secara ekonometrik, pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Pengujian heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas digunakan dalam pengujian asumsi klasik. Asumsi klasik diperlukan agar hasil regresi yang diperoleh bersifat valid (Purba *et al.*, 2021).

3.6.3.1. Uji Normalitas¹⁰⁹

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dari uji asumsi klasik, perlu dipastikan apakah data terdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji Histogram, dan uji Probabilitas plot adalah beberapa teknik yang digunakan untuk memastikan apakah data terdistribusi normal (Purba *et al.*, 2021).

Menurut uji Kolmogorov-Smirnov, data yang terdistribusi normal didefinisikan sebagai data yang memiliki nilai *asympt.sig (2-tailed)* > 0,05; menurut uji Histogram, data yang terdistribusi normal didefinisikan sebagai data yang memiliki grafik histogram berbentuk lonceng sempurna; dan menurut uji Plot Probabilitas, data normal didefinisikan sebagai data yang titik-titiknya tersebar di sepanjang garis diagonal (Purba *et al.*, 2021). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai berikut :

H₀: Data tidak berdistribusi normal.

H₁: Data berdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah variabel independen berkorelasi, digunakan uji multikolinearitas. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai $tolerance > 0,01$ dan $variance\ inflation\ factor$ (VIF) < 10 . (Purba *et al.*, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H₀: Model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

H₁: Model regresi terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat varians yang tidak sama pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Uji ini dilakukan menggunakan *scatter plot* dan uji *Glesjer* (Purba *et al.*, 2021). Kehadiran heteroskedastisitas dapat memengaruhi interpretasi koefisien regresi, sehingga memastikan asumsi ini terpenuhi sangat penting untuk menghasilkan model yang konsisten dan valid.

Ditapkan bahwa tidak ada kesamaan varians residual antar observasi jika hasil uji *scatter plot* menunjukkan bahwa titik-titik tersebut terdistribusi secara acak dan tidak membentuk pola. Ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi dalam model regresi. Ditapkan bahwa tidak ada kesamaan varians residual antar observasi dalam model regresi jika temuan uji *Glesjer* menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga hasil estimasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya

¹⁰
(Purba *et al.*, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

H₀: Model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas

H₁: Model regresi terjadi heteroskedastisitas

3.6.4. Uji Hipotesa

3.6.4.1. Regresi Linear Berganda

Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk memastikan sejauh mana variabel independen yang sedang diteliti memiliki dampak terhadap variabel dependen (Purba *et al.*, 2021). Hasil pengolahan data menghasilkan sejumlah pengaruh, antara lain ⁸⁷ 1) pengaruh positif dan substansial, 2) pengaruh positif dan dapat diabaikan, 3) pengaruh negatif dan signifikan, dan 4) pengaruh negatif dan tidak signifikan. Melalui hasil tersebut, ¹⁷⁰ analisis ini memberikan informasi penting tentang hubungan antar variabel yang diteliti. ⁷ Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut (dengan asumsi 5 buah variabel bebas dan 1 variabel terikat) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

⁷² Y = Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefesien Regresi

X_1 = Pengendalian Internal

X_2 = *Good Governance*

ϵ = *Error* (tingkat kesalahan)

3.6.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah ditentukan menggunakan uji T. Uji ini membantu menentukan peran pasti yang dimainkan setiap komponen dalam model regresi. Studi ini dapat menemukan variabel mana yang paling relevan dalam memengaruhi hasil penelitian. Dengan kata lain, uji ini. Menurut Purba *et al.* (2021), dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Sebaliknya, jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4.3. Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua faktor independen dalam penelitian secara bersama-sama memiliki dampak pada variabel dependen, digunakan uji simultan, yang sering dikenal sebagai uji F. Dengan kata lain, tujuan uji ini adalah untuk memastikan apakah model regresi yang digunakan cukup untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Menurut Purba *et al.* (2021), Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah :

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen ditentukan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Dalam persentase, nilai R^2 berkisar antara 0% dan 100%, atau antara 0 dan 1.

Kemampuan variabel independen untuk menjelaskan perubahan pada variabel dependen meningkat seiring dengan nilai R^2 (Purba *et al.*, 2021).

Hampir seluruh variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen jika nilai R^2 mendekati 1. Sebaliknya, hanya sebagian kecil varians pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen jika nilai R^2 mendekati nol. Nilai Adjusted R^2 , yaitu nilai R^2 yang telah disesuaikan untuk mencegah bias akibat penambahan jumlah faktor independen, biasanya digunakan dalam penelitian yang melibatkan banyak variabel independen (Purba *et al.*, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Penelitian ini mengambil fokus pada 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif beroperasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penentuan unit analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun rincian daftar serta profil singkat dari masing-masing OPD yang menjadi objek amatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

No	KATEGORI	DINAS/INSTANSI PEMERINTAH
1	Dinas	Dinas Pendidikan
2		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4		Satuan Polisi Pamong Praja
5		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
9		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
12		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13		Dinas Penanaman Modal dan P23SP
14		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan
15		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16		Dinas Perikanan

17		Dinas Pertanian
18	Badan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
19		Badan Keuangan dan Aset Daerah
20		Badan Pendapatan Daerah
21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24		Sekretariat Daerah
25		Sekretariat DPRD
26		Inspektorat Daerah

Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/325876/perda-kab-indragiri-hilir-no-1tahun-2025>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kasubag, bendahara, dan staf/pegawai yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun di masing-masing OPD dan pegawai yang turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran dan yang terlibat dalam pelaporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebar secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi kantor dari masing-masing OPD tersebut. Peneliti menyebarkan sebanyak 70 kuesioner pada 26 OPD dan kuesioner yang kembali kepada peneliti sebanyak 60 kuesioner, dengan demikian sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden.

Tingkat pengembalian responden (*Response rate*) dalam penelitian ini tergolong tinggi yaitu sebesar 85% tingginya *response rate* ini disebabkan oleh penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung sedangkan kuesioner yang

tidak dikembalikan disebabkan oleh kesibukan aparat/staf bagian keuangan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai tingkat pengembalian (*response rate*) dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Gambaran Analisis Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	70	100%
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	60	85%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	10	15%
4.	Total kuesioner yang bisa diolah untuk dianalisis akhir	60	85%

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

16

4.1.2. Deskripsi Responden

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data dari 60 kuesioner yang dapat diolah secara lengkap sebagaimana disajikan pada tabel demografi responden pada tabel 4.3 berikut ini.

16

Tabel 4.3 Demografi Responden

No	Data	Jumlah	Persentase
1.	Umur/22 a	60	100%
	20-30 Tahun	14	23%
	31-40 Tahun	17	29%
	41-50 Tahun	20	33%
	16 >50 Tahun	9	15%
2.	Jenis Kelamin	60	100%
	Laki-laki	25	42%
	Perempuan	35	58%
3.	Lama Bekerja	60	100%
	1-5 Tahun	4	7%
	6-10 Tahun	20	33%
	>10 Tahun	36	60%
4.	Jenjang Pendidikan	60	100%
	SMA	12	20%
	Diploma	5	8%
	Sarjana	35	58%
	25 Magister	8	14%

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

⁶ Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat dari sisi usia terdapat sebanyak 14 responden atau 23% responden yang berada dalam rentang usia 20-30 tahun, kemudian sebanyak 17 responden atau 29% responden berada dalam rentang usia 31-40 tahun, sebanyak 20 responden atau 33% responden berada dalam rentang usia 41-50 tahun, dan sebanyak 9 responden atau 15% responden berusia diatas 50 tahun. Hal ini mengartikan bahwa sebagian besar responden atau aparatur/staf bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada dalam usia lumayan cukup tidak produktif.

⁶ Berdasarkan data yang diperoleh, responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 25 responden (42%) dan responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 35 responden (58%). Hal tersebut mengartikan bahwa sebagian besar ⁶ responden atau aparatur/staff bagian keuangan berjenis kelamin wanita. Dilihat ⁵ dari lama bekerja, aparatur/staff bidang keuangan sebagian besar telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 36 responden (60%), kemudian responden yang bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 20 responden (33%), dan sebanyak 4 responden (7%) yang bekerja kurang dari 1-5 tahun.

Dilihat dari segi pendidikan terakhir, pendidikan terakhir aparatur/staff ⁶ bagian keuangan didominasi oleh sarjana yaitu sebanyak 35 responden (58%) Lalu disusul oleh responden dengan pendidikan akhir SMA sederajat yaitu sebanyak 12 responden (20%). ⁶ Responden yang berpendidikan Magister yaitu sebanyak 8 responden (14%), dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir paling rendah adalah Responden yang berpendidikan Diploma yaitu sebanyak 5 responden (8%).

1

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan data yang digunakan. Berikut ini adalah rangkuman hasil uji statistik deskriptif yang dapat dilihat.

25

Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	60	34.00	50.00	42.4000	4.52563
Good Governance	60	31.00	50.00	41.0667	4.56912
Kinerja Instansi Pemerintah	60	32.00	50.00	41.5000	4.26853
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

18

Pada tabel 4.4 berdasarkan tabel *Descriptive Statistics*, diketahui bahwa jumlah responden (N) yang diolah pada penelitian ini berjumlah 60 responden. Pada variabel (X_1) Pengendalian Internal terdiri dari 10 pertanyaan, Responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimal jawaban adalah 34 dan nilai maksimal adalah 50 dengan rata-rata jawaban 42,40 serta standar deviasi 4,525. Variabel (X_2) *Good Governance* terdiri dari 10 pertanyaan dan memiliki nilai jawaban minimal adalah 31 dan maksimal 50 dengan rata-rata jawaban 41,06 serta dengan standar deviasi 4,569. Variabel (Y) Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 10 pertanyaan dan memiliki nilai jawaban minimal adalah 32 dan maksimal 50 dengan rata-rata jawaban 41,50 serta dengan standar deviasi 4,268.

4.2.2. Uji Kualitas Data

12

4.2.2.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap data penelitian yang didapat dari data primer atau hasil angket yang disampaikan kepada responden. Hasil tersebut diberikan skor nilai. Terhadap hasil dari skor nilai tersebut dilakukan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid dan menguji konsistensi butir-butir pertanyaan sehingga dapat menggambarkan indikator yang diteliti (Purba *et al.*, 2021).

1

Rumus untuk mencari *degree of freedom* (df) adalah, banyaknya sampel penelitian (N) dikurangi banyaknya variabel (k). $Df = n - k = 60 - 2 = 58$, berdasarkan tabel *r product moment* diperoleh nilai r tabel sebesar 0,254. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil pengujian validitas Untuk Variabel Pengendalian internal ditunjukkan dalam tabel berikut.

16

27

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal

Item pertanyaan ke	R Hitung	R Tabel	Sign	Keterangan
1	0,501	0,254	0,001	Valid
2	0,682	0,254	0,001	Valid
3	0,744	0,254	0,001	Valid
4	0,701	0,254	0,001	Valid
5	0,726	0,254	0,001	Valid
6	0,672	0,254	0,001	Valid
7	0,733	0,254	0,001	Valid
8	0,663	0,254	0,001	Valid
9	0,611	0,254	0,001	Valid
10	0,740	0,254	0,001	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

1

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukan hasil uji validitas pada variabel pengendalian internal bahwa 10 item pertanyaan yang digunakan memiliki $r_{hitung} >$

dari r_{tabel} (0,254) atau nilai signifikansi $< 0,05$, ini menandakan bahwa pertanyaan atau indikator tersebut valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel *Good Governance*

Item pertanyaan ke	R Hitung	R Tabel	Sign	Keterangan
1	0,680	0,254	0,001	Valid
2	0,590	0,254	0,001	Valid
3	0,747	0,254	0,001	Valid
4	0,619	0,254	0,001	Valid
5	0,526	0,254	0,001	Valid
6	0,648	0,254	0,001	Valid
7	0,426	0,254	0,001	Valid
8	0,488	0,254	0,001	Valid
9	0,778	0,254	0,001	Valid
10	0,563	0,254	0,001	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel *Good Governance* bahwa 10 item pertanyaan yang digunakan memiliki $r_{\text{hitung}} >$ dari r_{tabel} (0,254) atau nilai signifikansi $< 0,05$, ini menandakan indikator tersebut valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah

Item pertanyaan ke	R Hitung	R Tabel	Sign	Keterangan
1	0,596	0,254	0,001	Valid
2	0,755	0,254	0,001	Valid
3	0,701	0,254	0,001	Valid
4	0,824	0,254	0,001	Valid
5	0,838	0,254	0,001	Valid
6	0,798	0,254	0,001	Valid
7	0,813	0,254	0,001	Valid
8	0,765	0,254	0,001	Valid
9	0,830	0,254	0,001	Valid
10	0,778	0,254	0,001	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah bahwa 10 item pertanyaan yang digunakan memiliki

$r_{hitung} > \text{dari } r_{tabel} (0,254)$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, ini menandakan bahwa pertanyaan atau indikator tersebut valid.

4.2.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan terhadap data primer yang didapat dari hasil angket. Untuk melihat kehandalan data tersebut maka dilakukan uji reliabilitas. Kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang pada sampel yang berbeda dan apabila hasil yang didapat relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (*reliabel*). Sebaliknya, bila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh tidak konsisten dengan hasil sebelumnya maka alat ukur tersebut dianggap tidak reliabel.

Data *reliabel* didapat nilai koefisien alpha (*cronbach alpha*) $> 0,60$ maka angket tersebut dinyatakan *reliabel* (Purba *et al.*, 2021). Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menggunakan SPSS terhadap kuesioner pada semua variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standard	Keterangan
Pengendalian Internal	0,863	0,600	Reliabel
Good Governance	0,803	0,600	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah	0,921	0,600	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Pada tabel 4.8 menunjukan nilai *Cronbach's Alpha* atau variabel Pengendalian Internal sebesar (0,863). *Good Governance* sebesar (0,803) dan Kinerja Istansi Pemerintah sebesar (0,921). Dapat disimpulkan bahwa

Pernyataan-pernyataan dalam kuesioer ini reliabel karena menunjukkan variabel tersebut $> 0,60$ dan tidak ada satu pun yang $< 0,60$.

¹ 4.2.3. Uji Asumsi Klasik

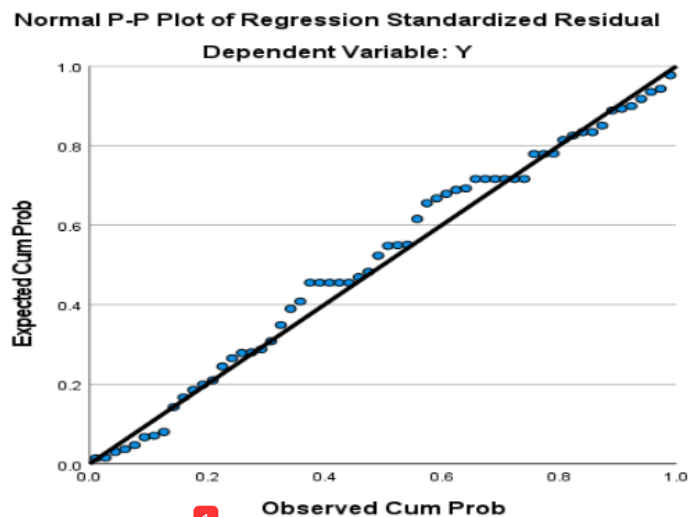
4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. ⁴ Untuk mendapatkan hasil yang valid dari uji asumsi klasik, maka perlu diketahui apakah data tersebut sudah berdistribusi normal. Beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi normal yaitu dengan uji *kolmogorop-smirnov*, uji *histogram* dan uji *probability plot*. Kombinasi antara uji statistik dan analisis grafik ini diterapkan guna meminimalisir risiko kesalahan dalam penarikan kesimpulan (Purba *et al.*, 2021).

Hasil ujistatistik lebih baik jika variabel penelitian berdistribusi secara normal, jika data tidak berdistribusi normal akan menyebabkan kekeliruan dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian. Oleh karena itu untuk memastikan keabsahan distribusi data secara akurat dan objektif, diperlukan metode pengujian yang bersifat visual sekaligus matematis. ¹ Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafis yaitu normal *probability plots* dan dengan menggunakan analisis uji statistik *kolmogorov-smirnov* (k-s). Normal *probability plot* digunakan untuk melihat pola penyebaran data dibandingkan dengan distribusi normal teoritis.

¹ Apabila data berada didekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sementara itu jika titik-titik

menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal, sebagaimana tersaji sebagai berikut:

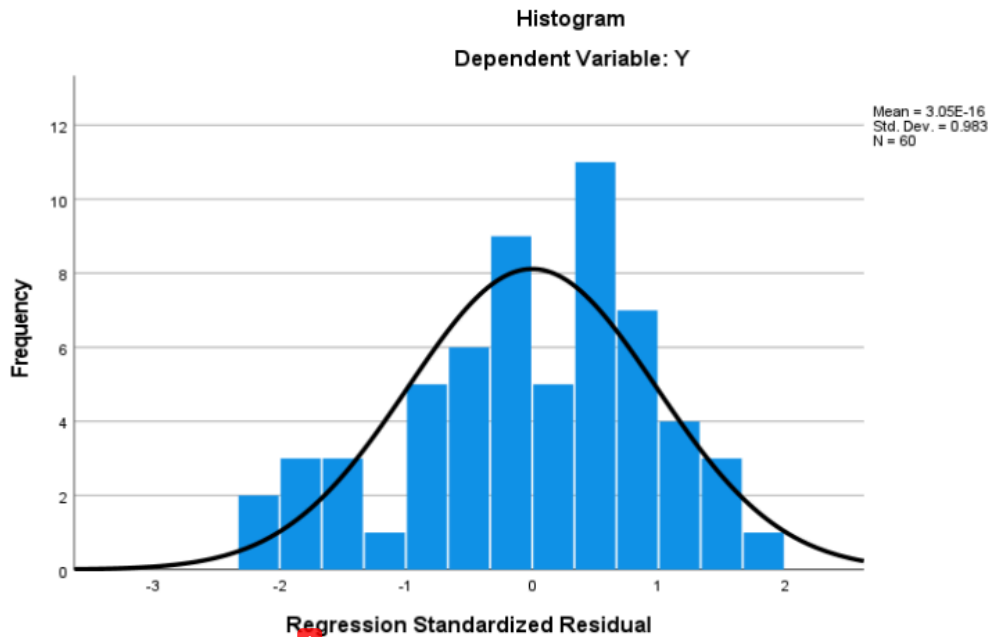


1
Gambar 4.1 Normal P-P Plot

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat dari grafik *chart normal probability plot* diatas yang mana menunjukkan bahwa titiknya mendekati garis diagonal, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

4
Data berdistribusi normal berdasarkan uji histogram adalah jika hasil pengujian didapat sebuah grafik histogram berbentuk lonceng sempurna. Uji histogram digunakan untuk menilai pola penyebaran data. Apabila histogram menunjukkan bentuk 4 yang mendekati distribusi normal (simetris dan berbentuk lonceng), maka data dianggap memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila histogram menunjukkan bentuk tidak simetris, maka data tidak berdistribusi normal.



Gambar 4.2 Grafik Histogram

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 27)*, 2026

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat dari histogram diatas yang mana menunjukkan bahwa sebuah grafik histogram berbentuk lonceng sempurna. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

Dalam penelitian ini untuk memperkuat asumsi normal atau tidaknya penelitian, yang mana sebelumnya telah dijelaskan pada gambar normal p-p plot dan histogram di atas maka dilakukan uji *non parametik kolmogro-smirnov (k-s)*, Data berdistribusi normal berdasarkan uji *Kolmogorov-smirnov* adalah jika hasil pengujian didapat nilai *asympt.sig (2-tailed) > 0,05* (Purba *et al.*, 2021), Sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai berikut :

H_0 : Data tidak berdistribusi normal.

H_1 : Data berdistribusi normal.

Data yang digunakan dapat dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi data kurang dari 0,05 maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Adapun hasil output SPSS uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9

15
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40985449
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.057
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.243
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.232
		.254

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

1d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 27), 2026*

2
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil uji *kolmogrov-smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai sig = 0,200 sehingga > 0,05, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

20 4.2.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel-variabel bebas adalah dengan melakukan uji multikolinearitas. Jika berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapat nilai

$Tolerance > 0,01$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas (Purba *et al.*, 2021). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan *Tolerance Value* $> 0,01$ maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dan jika nilai VIF > 10 dan *Tolerance Value* $< 0,01$ maka terdapat gejala multikolinieritas. Melalui hasil output dapat diketahui secara pasti nilai tolerance dan VIF dari masing-masing variabel independen yang diuji. Adapun hasil output SPSS uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.		
	B	Std. Error	Beta	t	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	6.974	3.221		2.166	.035		
Pengendalian Internal	.253	.096	.269	2.650	.010	.544	1.837
Good Governance	.579	.095	.620	6.118	.000	.544	1.837

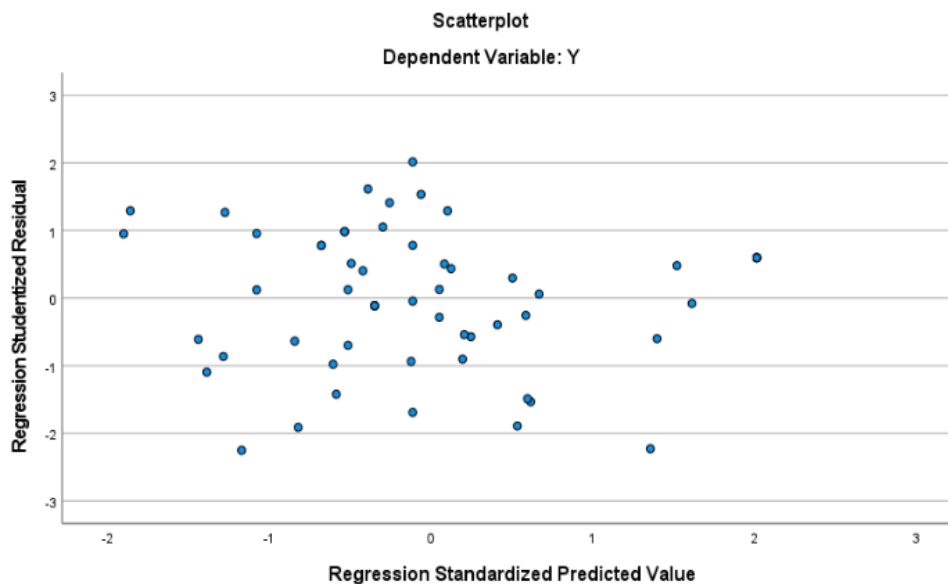
a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Berdasarkan tabel 4.10 dapat kita lihat bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,01 (*tolerance* 0,01) dan nilai VIF (*variance inflation factor*) lebih kecil dari 10,00 (VIF $< 10,00$). Nilai *tolerance* untuk Pengendalian Internal sebesar 0,544 dan *Good Governance* sebesar 0,544. Nilai VIF Pengendalian Internal sebesar 1,837 dan *Good Governance* sebesar 1,837. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat multikolonieritas dalam penelitian ini.

4.2.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain²⁰ dilakukan uji heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji *scatter plot* dan uji *glesjer*. Keberadaan heterokedastisitas dapat memengaruhi interpretasi koefisien regresi, sehingga penting untuk memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi guna menghasilkan model yang konsisten dan valid.¹ Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatter plot*. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tiak terjadi heterokedastisitas



Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 27), 2026*

¹ Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

dalam model regresi penelitian ini, sehingga data dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

Keberadaan heteroskedastisitas dapat memengaruhi interpretasi koefisien regresi, sehingga penting untuk memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi guna menghasilkan model yang konsisten dan valid. Jika hasil uji *glesjer* didapat hasil nilai signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan pada model regresi tidak terjadi kesamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan penelitian.

94
Tabel 4.11 Hasil Uji *Glesjer*

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	2.026	5.421		.374
	Pengendalian Internal	.012	.161	.014	.077
	Good Governance	.001	.159	.001	.005
					Sig.
					.710
					.939
					.996

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Pada tabel 4.11 hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Dari output diatas, maka tampak bahwa kedua variabel tidak ada gejala heteroskedasitas, variabel Pengendalian internal dengan nilai signifikan 0,939 > 0,05. *Good governance* dengan nilai signifikan 0,996 > 0,05 maka, tidak terjadi gejala heteroskedasitas.

4.2.4. Uji Hipotesa

4.2.4.1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas yang diuji sebagai terhadap variabel terikat (Purba *et al.*, 2021). Uji regresi linear berganda mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan dengan tujuan memprediksi dan menganalisis hubungan antar variabel. Analisis ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Melalui analisis regresi linear berganda, dapat diketahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pengendalian Internal

X_2 = *Good Governance*

ϵ = *Error* (tingkat kesalahan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Pengaruh Pengendalian Internal, dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.974	3.221		2.166	.035
Pengendalian Internal	.253	.096	.269	2.650	.010
Good Governance	.579	.095	.620	6.118	.001

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 27), 2026*

$$Y = 6,974 + 0,253X_1 + 0,579X_2 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta sebesar 6,974, menunjukkan arti bahwa apabila nilai Pengendalian Internal dan *Good Governance* bernilai 0, maka Kinerja Instansi Pemerintah akan tetap sebesar 6,974.

2. Variabel Pengendalian Internal mempunyai koefisien regresi sebesar 0,253 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu persen dari Pengendalian Internal menyebabkan kenaikan nilai pada Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,253.

3. Variabel *Good Governance* mempunyai koefisien regresi sebesar 0,579 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu persen dari *Good Governance* menyebabkan kenaikan nilai pada Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,579.

4.2.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini membantu dalam memahami kontribusi spesifik setiap faktor dalam model regresi. Analisis ini dapat mengidentifikasi variabel yang paling signifikan dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level*

0,05 ($\alpha = 5\%$). Suatu variabel dinyatakan berpengaruh secara signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Berikut adalah tabel yang menjelaskan hasil pengujian regresi parsial (uji-T).

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji-T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	6.974	3.221		.035
	Pengendalian Internal	.253	.096	.269	.010
	Good Governance	.579	.095	.620	.001

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Berdasarkan output diatas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, dengan $Df = n - k = 60 - 3 = 57$:

1. Pengendalian Internal memiliki T_{hitung} sebesar 2,650 sedangkan T_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,650 > 2,002$) dengan nilai signifikansi untuk variabel Pengendalian Internal 0,010 dari pada taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Good Governance memiliki T_{hitung} sebesar 6,118 sedangkan T_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($6,118 > 2,002$) dengan nilai signifikansi untuk variabel Good Governance 0,001 dari pada taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.4.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (Pengendalian internal dan *Good governance*) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Instansi Pemerintah). Dengan kata lain uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak atau tidak untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini uji simultan dilakukan dengan membandingkan hasil F_{hitung} dengan F_{tabel} sebagaimana tersaji pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	732.363	2	366.182	60.917	.001 ^b
	Residual	342.637	57	6.011		
	Total	1075.000	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Berdasarkan pada tabel 4.13 maka dapat diketahui hasil anova (*analysis of variants*) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai F_{hitung} sebesar 60,917 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,159. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001, lebih kecil dari pada taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, H_3 diterima.

4.2.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel terikat Nilai R^2 , berkisar antara 0 sampai dengan 1, atau dalam bentuk persentase antara 0% hingga 100%. Semakin besar nilai R^2 , semakin besar pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (Purba *et al.*, 2021). untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel yang menjelaskan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.825 ^a	.681	.670	2.452	.681	60.917	2	57	.000

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Olahan SPSS (versi 27), 2026

Berdasarkan hasil dari *table summary* bahwa besar nilai $R = 0,825$ dan nilai koefisien determinasi $R_{square} = 0,681$. Maka berdasarkan hasil olahan *spss 27.0 for windows* dan dengan rumus $KP = 0,681 \times 100\% = 68,1\%$. Maka menunjukkan bahwa pengaruh yang di sumbangkan oleh variabel bebas Pengendalian Internal (X_1) dan *Good Governance* (X_2) terhadap variabel terikat Kinerja Instansi

Pemerintah (Y) sebesar 68,1% sedangkan sisanya 31,9% dipengaruhi oleh diluar variabel.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel Pengendalian Internal memiliki t_{hitung} sebesar 2,650 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,650 > 2,002$) dengan nilai signifikansi untuk variabel Pengendalian Internal 0,010 dari pada taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Dari hasil analisis data diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil ini mencerminkan bahwa semakin baik penerapan Pengendalian Internal, maka semakin tinggi pula Kinerja Instansi Pemerintah yang dihasilkan. Indikator Pengendalian Internal yaitu yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, secara umum telah diimplementasikan dengan cukup baik. Hasil ini mendukung Teori Keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik aparatur sebagai agen. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai

dengan tujuan organisasi yang baik sehingga kinerja instansi pemerintah meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.*, (2024) berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kinerja instansi yang sesuai dengan value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas).

4.3.2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel *Good Governance* memiliki t_{hitung} sebesar 6,118 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,118 > 2,002$) dengan nilai signifikansi untuk variabel *Good Governance* 0,001 dari pada taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Dari hasil analisis data diatas peneliti menyimpulkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil ini mencerminkan bahwa semakin baik penerapan *Good Governance*, maka semakin tinggi pula Kinerja

Instansi Pemerintah yang dihasilkan. Indikator-indikator *Good Governance* yaitu yang terdiri dari kemampuan, akuntabilitas dan transparansi secara umum telah diimplementasikan dengan cukup baik. Hasil ini mendukung ¹¹¹ Teori *Stewardship* yang menyatakan bahwa aparat pemerintah sebagai *steward* akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. ¹²⁵ Penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong tercaainya ¹⁸⁷ kinerja instansi pemerintah yang lebih baik.

⁶⁹ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina *et al.*, (2023) yang mengemukakan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Buruh Selatan. ³ Menyebutkan bahwa *good governance* memaknai upaya pemerintah untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan membuka ruang leluasa dan melibatkan peran masyarakat, sehingga terciptanya sebuah transparansi kinerja. Transparansi tersebut menciptakan suatu indeks penilaian terhadap akuntabilitas suatu instansi, adapun sementara akuntabilitas instansi mencakup pengungkapan dan pertanggung jawaban dari pihak-pihak terkait baik berupa tindakan, laporan finansial hingga keputusan yang diambil oleh instansi.

² 4.3.3. Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* Secara Simultan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

¹ Hasil anova (*analysis of variants*) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai F_{hitung} sebesar 60,917 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,159. Dari tabel 4.13 dapat

dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001, lebih kecil dari pada taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel ¹ Pengendalian Internal dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, H_3 diterima. Hasil ¹⁶⁶ yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

⁹⁹ Dari hasil analisis data diatas peneliti menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hasil ini mendukung teori keagenan dan teori *stewardship*. Pengendalian internal berperan sebagai alat pengawasan untuk meminimalkan penyimpangan, sedangkan *good governance* mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari kombinasi keduanya mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah menjadi lebih optimal. Peningkatan kinerja instansi pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan satu faktor saja, melainkan membutuhkan sinergi antara sistem pengendalian internal yang efektif ³⁰ dan penerapan prinsip *good governance* yang konsisten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja instansi pemerintah akan lebih optimal apabila pengendalian internal berjalan secara efektif sekaligus didukung oleh penerapan *good governance* dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah.

¹²¹ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani *et al.*, (2024), yang mewakili variabel independen *pengendalian internal*, Yang mengatakan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam

⁵ memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan Karlina *et al.*, (2023), yang mewakili variabel independen *Good Governance*, ³ menyebutkan bahwa *good governance* memaknai upaya pemerintah untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan membuka ruang leluasa dan melibatkan peran masyarakat, sehingga terciptanya sebuah transparansi kinerja. Transparansi tersebut menciptakan suatu indeks penilaian terhadap akuntabilitas suatu instansi pemerintah, sementara akuntabilitas instansi mencakup pengungkapan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait baik berupa tindakan, laporan finansial hingga keputusan yang diambil oleh instansi. Dua peneliti di atas mengemukakan ² pengendalian internal dan *Good Governance* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hipotesa yang pertama dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengendalian internal terhadap Kinerja Instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Variabel Pengendalian Internal memiliki t_{hitung} sebesar 2,650 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,650 > 2,002$) dengan nilai signifikansi untuk variabel Pengendalian Internal 0,010 dari pada taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka aparatur pemerintah dapat bekerja lebih terarah, disiplin, dan sesuai prosedur sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
2. Hipotesa yang kedua dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Variabel *Good Governance* memiliki t_{hitung} sebesar 6,118 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,118 > 2,002$)

dengan nilai signifikansi untuk variabel *Good Governance* 0,001 dari pada taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka kinerja instansi pemerintah juga akan semakin meningkat. Dalam penerapan *good governance*, aparat pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

3. Hipotesa yang ketiga dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Internal dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil anova (*analysis of variants*) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai F_{hitung} sebesar 60,917 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,159. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001, lebih kecil dari pada taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan Kedua variabel tersebut saling mendukung dan memperkuat dalam membentuk Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Kolaborasi antara pengendalian Internal dan *Good Governance* terbukti efektif dalam Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti Transparansi yaitu keterbukaan informasi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kinerja instansi pemerintah.

Penambahan variabel ² ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya sekaligus meningkatkan keterbaruan dan relevansi penelitian di masa mendatang.

2. Bagi OPD Tembilahan, diharapkan dapat meningkatkan Pengendalian Internal dan *Good Governance* agar berdampak pada kinerja instansi pemerintah yang lebih optimal. Dengan penguatan ⁵⁹ pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten, diharapkan proses kerja instansi menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja instansi pemerintah dapat meningkat.

² 3. Bagi Akademis atau Kampus Unisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh ¹ Pengendalian Internal, dan *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai referensi tambahan di perpustakaan.

ORIGINALITY REPORT

47%
SIMILARITY INDEX

45%
INTERNET SOURCES

25%
PUBLICATIONS

23%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	9%
2	repository.unisi.ac.id Internet Source	5%
3	journal.arimbi.or.id Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
6	je.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1%
7	ecampus.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	1%
8	repo.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	jatim.bpk.go.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
12	repository.stiegici.ac.id Internet Source	1%
13	stia-saidperintah.e-journal.id Internet Source	1%
14	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%
15	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%

16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
17	cdn.juris.id Internet Source	<1 %
18	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jember Student Paper	<1 %
20	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
21	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.eka-prasetya.ac.id Internet Source	<1 %
23	malangkota.go.id Internet Source	<1 %
24	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
25	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
29	repository.umb.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
32	fe.unp.ac.id Internet Source	<1 %

33	klungkungkab.go.id Internet Source	<1 %
34	bappeda.inhilkab.go.id Internet Source	<1 %
35	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
36	123dok.com Internet Source	<1 %
37	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III Student Paper	<1 %
38	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
39	jdih.niaskab.go.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
41	diskopumkm.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
42	ojs.selodangmayang.com Internet Source	<1 %
43	www.scribd.com Internet Source	<1 %
44	Kariyoto Kariyoto. "Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik", Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 2018 Publication	<1 %
45	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
46	unidjar.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
48	core.ac.uk Internet Source	<1 %
49	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %

		<1 %
50	repository.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
52	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
53	adoc.pub Internet Source	<1 %
54	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
55	media.neliti.com Internet Source	<1 %
56	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
57	Steffani Imelda Lailarawati Lahur, Lamria Simamora, Muhammad Ichsan Diarsyad. "PENGARUH KEJELASAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (Studi Kasus Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara)", JEMBA : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan bisnis, Akuntansi, 2022 Publication	<1 %
58	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
59	Jefri Herbert Mailoor, Jullie J Sondakh, Hendrik Gamaliel. "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017 Publication	<1 %
60	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
61	putrispm.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	paralegal.id Internet Source	<1 %

63	tubankab.go.id Internet Source	<1 %
64	Sri Wulandari, Sugianto Sugianto, Yenni Samri Juliati. "Apparatus Quality as the Main Determinant of Financial Report Quality", Academia Open, 2025 Publication	<1 %
65	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
66	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
67	vclass.unila.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
69	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
70	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
71	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	<1 %
73	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
74	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
75	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
76	eprints.upj.ac.id Internet Source	<1 %
77	Azizah Azizah, Fadilah Nurdin, Megawati Megawati. "Dinamika Curahan Waktu Kerja Keluarga terhadap Produktivitas Tanaman Kentang di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat", Agriculture and Socio-Economic Journal, 2026 Publication	<1 %
78	docplayer.info Internet Source	<1 %

79	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
80	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
81	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
82	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
83	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	<1 %
84	eprints.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
85	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet Source	<1 %
86	Adela Ayudia Putri, Mochammad Mukti Ali. "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Soreang", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
87	Rima Harati. "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Regional terhadap Kesempatan Kerja di Kalimantan Tengah", Anterior Jurnal, 2024 Publication	<1 %
88	binamarga.pu.go.id Internet Source	<1 %
89	docobook.com Internet Source	<1 %
90	repository.upp.ac.id Internet Source	<1 %
91	Dodi Agusra. "Pengaruh Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Tepung Bumbu Mamasuka", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2018 Publication	<1 %
92	Maria Febiola Agustina, Hamun S Masin, Yesika Yanuarisa. "PENGARUH SELF ESTEEM, BUDGET EMPHASIS, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP BUDGETARY SLACK (STUDI EMPIRIS PADA APARATUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA PALANGKA RAYA)", Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan, 2020	<1 %

93	Neng Asiah, Sabaruddinsah Sabaruddinsah. "PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MANAGEMENT CONTROL SYSTEM SERTA BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2021 Publication	<1 %
94	Submitted to Papua University Student Paper	<1 %
95	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
96	ppid.inhilkab.go.id Internet Source	<1 %
97	publikasi.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
98	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
99	Hilma Harmen, Jonathan Siringoringo, Luhut Manurung, Najha Nawanda et al. "Pengaruh Pengawasan Internal dan Etika Kerja terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Balai Besar POM di Medan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
100	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
101	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	<1 %
102	jurnal.stiks-tarakanita.ac.id Internet Source	<1 %
103	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
104	repository.unbara.ac.id Internet Source	<1 %
105	Submitted to East Union High School Student Paper	<1 %
106	Lalu Ariel Azmar Vivaldi, Iman Waskito, Wulandari Agustiningsih. "EVALUASI PERAN INCOME AUDIT SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI HOTEL NOVOTEL LOMBOK", Jurnal Maneksi, 2026 Publication	<1 %

107	Submitted to Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Student Paper	<1 %
108	id.123dok.com Internet Source	<1 %
109	repository.itsi.ac.id Internet Source	<1 %
110	repository.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
111	Imroatus Sholiha, Dewi Casmiwati. "Analisis Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tambaksari dalam Menerapkan Good Governance", Indonesian Journal of Public Administration Review, 2024 Publication	<1 %
112	Jhony France, Rahmiati Rahmiati, Christian Ether. "Optimalisasi Program Musrenbang Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penganggaran Daerah Di Kecamatan Pahandut", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
113	Yolin Tri Wedari, Paul Eduard Sudjiman, Marlinda Siahaan. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
114	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
115	feb.untan.ac.id Internet Source	<1 %
116	repository.kalbis.ac.id Internet Source	<1 %
117	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
118	Imam Darmawan, Ovriyadin Ovriyadin, Nafisah Nurulrahmatiah, Marsya Humairah, Reza Fitriani. "Determinan penerapan good governance pada pemerintah daerah Kota Bima", Journal of Management and Digital Business, 2024 Publication	<1 %
119	owner.polgan.ac.id Internet Source	<1 %

120	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
121	Anggie Rizka S, Zamzami Zamzami, Muhammad Gowon. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2021 Publication	<1 %
122	Fandy Nikijuluw. "Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2025 Publication	<1 %
123	Jely Suryani, LCA Robin Jonathan, Sayid Irwan. "Analisis Determinan Faktor Cash Holding pada Subsektor Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Research Journal of Accounting and Business Management, 2024 Publication	<1 %
124	disdukcapil.langkatkab.go.id Internet Source	<1 %
125	jptam.org Internet Source	<1 %
126	Indah Sevia Ohorella, Melianus Salakory. "Agricultural Land Management to Increase Crop Production in Waimital Village, Kairatu District, West Seram Regency", GEOFORUM, 2025 Publication	<1 %
127	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
128	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
129	mainsaham.id Internet Source	<1 %
130	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
131	Syalma Adinda Putri, Maria Suryaningsih. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL", Jurnal Akuntansi, 2024 Publication	<1 %
132	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

133	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
134	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	<1 %
135	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
136	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
137	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1 %
138	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
139	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
140	Ni Kadek Desi Dwipayani, I Wayan Sudiana, Ni Wayan Alit Erlinawati. "Pengaruh Penengendalian Internal, Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)Se-Kecamatan Tampaksiring", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2026 Publication	<1 %
141	Nurul Amin, Viras Alti Pidola. "Pengaruh Sosialisasi Dan pengetahuan Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang (Studi Kasus: Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
142	Submitted to Universitas Papua Student Paper	<1 %
143	Zakiah Zakiah, Ranti Melasari, Rosliana Rosliana. "Pengaruh sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2026 Publication	<1 %
144	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
145	diskopumkm.inhilkab.go.id Internet Source	<1 %
146	dpmptsp.cimahikota.go.id Internet Source	<1 %

147	journal.politeknik-pratama.ac.id Internet Source	<1 %
148	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
149	Adel Mardilia, Kusminaini Armin, Padriyansyah. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya", Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management, 2024 Publication	<1 %
150	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Student Paper	<1 %
151	Nonce Farida Tuati, Deetje W. Manuain, Hapsa Usman. "THE Pengaruh Audit Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor", Jurnal Maneksi, 2025 Publication	<1 %
152	alexandria05.blogspot.com Internet Source	<1 %
153	conference.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
154	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
155	e-ppid.luwutimurkab.go.id Internet Source	<1 %
156	inspektoratkabbanjarnegara.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
157	new-campuran.blogspot.com Internet Source	<1 %
158	penerbitadm.pubmedia.id Internet Source	<1 %
159	sis.binus.ac.id Internet Source	<1 %
160	www.radarjawa.com Internet Source	<1 %
161	Anita Theresia Dwitasari, Asep Mulyana. "Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %

162	Ria Herlina, Taufeni Taufik, Azwir Nasir. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021 Publication	<1 %
163	Riyoldi Riyoldi, Herri Junius Nge, Eka Apriyani, Yustinus Rudiyanto, Nada Azwa Nazari, Ahirul Habib Padilah. "MODEL SINERGI PEMBANGUNAN DESA: INTEGRASI INFRASTRUKTUR, PEMBERDAYAAN, DAN PEMBINAAN UNTUK KEBERLANJUTAN", SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 2025 Publication	<1 %
164	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1 %
165	arifrohmanmakalahmanajemenstrateg.blogspot.com Internet Source	<1 %
166	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
167	ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1 %
168	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
169	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1 %
170	eprints.cibinstitute.com Internet Source	<1 %
171	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
172	es.scribd.com Internet Source	<1 %
173	id.scribd.com Internet Source	<1 %
174	istana128.blogspot.com Internet Source	<1 %
175	lepisi.ac.id Internet Source	<1 %
176	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
177	liputanoke.com Internet Source	<1 %
178	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
179	repository.moestopo.ac.id Internet Source	<1 %
180	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet Source	<1 %
181	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
182	www.jurnal.stisipbp.ac.id Internet Source	<1 %
183	Colfer C.J.P., Capistrano D., eds.. "Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2006 Publication	<1 %
184	Dhyaul Lail Lya Rahma, Sofie Sofie. "Pengaruh Akuntabilitas Pengurus, Transparansi Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Kepercayaan Donatur: Studi pada Humanities Project di Platform X", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
185	Elis Tri Wahyuni. "Pengaruh segmentasi pasar terhadap kepuasan pelanggan (nasabah) pada Bank BPR Jatim Cabang Ponorogo", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2017 Publication	<1 %
186	Ai Hendrani, Dadan Ramdhani, Thika Febriani, Sriyani Sriyani. "Corporate Tax Avoidance: Kontribusi Mekanisme Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	<1 %
187	Muhammad Gunawan, Yohanes Joni Pambelum, Rosel Rosel. "PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA DINAS KOTA PALANGKA RAYA)", Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan, 2023 Publication	<1 %

188	Putri fathia nurpadilah. "Makalah pengukuran kinerja", Open Science Framework, 2018 Publication	<1 %
189	Richard Mundung Mundung, Hendrik Manossoh, Peter Kapojos. "Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Manado", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Publication	<1 %
190	Silvia Nafilah, Ridwan Ridwan, Tjipto Sajekti. "Faktor Determinan Perilaku Keuangan Melalui Literasi Keuangan, Financial Technology dan Perilaku Konsumtif", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
191	Tim Bappeda Kota Pangkalpinang. "PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI, DAN INOVASI KEBIJAKAN TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE KOTA PANGKALPINANG", IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business, 2020 Publication	<1 %
192	Zanabel Nuriajan Tauda, Gregorius Jeandry, Sheila Kusumaningrum, Zainuddin Zainuddin. "Faktor-Faktor Penentu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: Dari Anggaran hingga Sistem Pelaporan", Owner, 2025 Publication	<1 %
193	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On